

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
(PPAS)  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2019**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
1.3. Dasar Hukum	2
<b>BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5</b>
2.1. Rencana Pendapatan	5
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	5
2.1.1.1. Pajak Daerah	5
2.1.1.2. Retribusi Daerah	5
2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	5
2.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5
2.1.2. Dana Perimbangan	6
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6
2.2. Rencana Pembiayaan Daerah	6
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2020</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>85</b>
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Tahun Anggaran 2020	85
4.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	88
<b>Usuran Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	89-1
- Dinas Kesehatan Daerah	89-2
- RSUD Undata	89-3
- RS Madani	89-4
- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	89-5
- Dinas Cipta Karya dan SDA	89-6
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	89-7
- Satuan Polisi Pamong Praja	89-8
- Dinas Sosial	89-9
<b>Usuran Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	89-10
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89-11
- Dinas Pangan	89-12
- Dinas Lingkungan Hidup Daerah	89-13

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	89-14
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89-15
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89-16
- Dinas Perhubungan	89-17
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	89-18
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89-19
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89-20
- Dinas Pemuda dan Olahraga	89-21
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89-22
<b>Urusan Pilihan</b>	
- Dinas Kelautan dan Perikanan	89-23
- Dinas Pariwisata	89-24
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	89-26
- Dinas Perkebunan dan Peternakan	89-27
- Dinas Kehutanan	89-28
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	89-29
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	89-30
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi</b>	
- Biro Umum	89-31
- TU Pimpinan	89-32
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	89-33
- Biro Administrasi Kewilayahan Daerah dan Pemerintahan	89-34
- Biro Otonomi Daerah	89-35
- Biro Hukum dan Perundang-Undangan	89-36
- Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	89-37
- Biro Organisasi	89-38
- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	89-39
- Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	89-40
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa	89-41
- Sekretariat DPRD	89-42
- Badan Penghubung	89-43
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89-44
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	89-45
- Insektorat Daerah	89-46
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	89-47
- Badan Pendapatan Daerah	89-48
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89-49
- Badan Kepegawaian Daerah	89-50
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	89-51
- Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	89-52
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)	90
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>91</b>
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	91
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	91
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020	7
Tabel 3.1	Matriks Prioritas Pembangunan	8
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2020	85
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung Tahun 2020	90
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2020	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses dalam rangka menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka proses penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati, yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang memuat rancangan program prioritas berdasarkan batas maksimal pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

PPAS tahun 2020 mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai. Prioritas program masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Selain hal tersebut diatas, PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara yang dirinci berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Tujuan**

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 adalah :

1. Sebagai Dokumen penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing SKPD, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan didalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

### **1.2.2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam Penyusunan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2020.

## **1.3. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 689).

**BAB II**  
**RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN**  
**PEMBIAYAAN DAERAH**

**2.1. Rencana Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp.2.813.063.646.741,00 sedangkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp.4.151.353.202.380,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.338.289.555.639,00 atau 32,23 persen. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.979.039.269.041,00 mengalami penurunan sebesar Rp.42.408.173.439,00 atau 4,15 persen apabila dibandingkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.021.447.442.480,00.

**2.1.1.1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah terdiri (dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Pada Tahun Anggaran 2020 Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.825.200.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.200.000.000,00 atau 0,15 persen dibandingkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.824.000.000.000,00.

**2.1.1.2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.11.140.760.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.2.908.412.000,00 atau 35,33 persen dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.232.348.000,00.

**2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.16.965.608.967,00 yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal milik daerah, tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2019.

#### **2.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.125.732.900.074,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.46.516.585.439,00 atau 27 persen dibandingkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.172.249.485.513,00.

#### **2.1.2 Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- 2) Dana Alokasi Umum; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.832.142.965.200,00. Apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.091.969.271.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.259.826.306.600,00 atau 40,75 persen.

#### **2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.881.412.500,00, sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.37.936.488.100,00, turun sebesar Rp.36.055.075.600,00 atau 95,04 persen.

#### **2.2. Rencana Pembiayaan Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp.55.428.542.595,00 Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp.66.700.000.000,00 Secara lengkap rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2020**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2020	SELISIH +/-
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,021,447,442,480.00</b>	<b>979,039,269,041.00</b>	<b>(42,408,173,439.00)</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	824,000,000,000.00	825,200,000,000.00	1,200,000,000.00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,232,348,000.00	11,140,760,000.00	2,908,412,000.00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,965,608,967.00	16,965,608,967.00	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172,249,485,513.00	125,732,900,074.00	(46,516,585,439.00)
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,091,969,271,800.00</b>	<b>1,832,142,965,200.00</b>	<b>(1,259,826,306,600.00)</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	205,582,623,800.00	194,553,995,200.00	(11,028,628,600.00)
2.2	Dana Alokasi Umum	1,637,588,970,000.00	1,637,588,970,000.00	-
2.3	Dana Alokasi Khusus	1,248,797,678,000.00	-	(1,248,797,678,000.00)
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>37,936,488,100.00</b>	<b>1,881,412,500.00</b>	<b>(36,055,075,600.00)</b>
3.1	Pendapatan Hibah	17,241,506,100.00	1,881,412,500.00	(15,360,093,600.00)
3.2	Pendapatan Lainnya	20,694,982,000.00	-	(20,694,982,000.00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,151,353,202,380.00</b>	<b>2,813,063,646,741.00</b>	<b>(1,338,289,555,639.00)</b>
<b>4</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>250,107,893,862.00</b>	<b>55,428,542,595.00</b>	<b>(194,679,351,267.00)</b>
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)	250,107,893,862.00	55,428,542,595.00	(194,679,351,267.00)
4.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
4.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
4.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
4.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>250,107,893,862.00</b>	<b>55,428,542,595.00</b>	<b>(194,679,351,267.00)</b>

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, 2019 (diolah)

BAB III  
PRIORITAS BELANJA  
DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Tahun 2020 di fokuskan pada 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Matriks Prioritas Pembangunan**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
I	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM,	<p>Terlaksananya peningkatan karir PNS</p> <p>Terlaksananya bantuan tugas belajar</p> <p>Terlaksananya seleksi Capra IPDN dan Ikatan Dinas Lainnya</p> <p>Kampanye Disiplin dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin</p> <p>Terlaksananya Pengembangan Karier JFT dan JFU</p> <p>Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Rekrutmen PNS</p> <p>Data dan informasi PNS</p> <p>Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana, Karpeg, Karis/Karsu</p> <p>Terbitnya SK perpindahan PNS</p> <p>Terbitnya SK kenaikan pangkat tepat waktu</p> <p>Terbitnya SK pensiun tepat waktu</p> <p>Terlaksananya pengujian dan penilaian kompetensi aparatur</p> <p>Terlaksananya analisis kebutuhan asesment center dan hubungan</p> <p>Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Diklat</p>	<p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b></p> <p><b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH</b></p>	<p><b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b></p> <p>Pengembangan Karir Jabatan Struktural</p> <p>Pemberian Bantuan Tugas Belajar</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan Ikatan Dinas Lainnya</p> <p>Pembinaan PNS</p> <p>Pengembangan Jabatan Fungsional</p> <p><b>Program Penataan Kepegawaian</b></p> <p>Penyusunan Formasi dan Seleksi CPNS</p> <p>Pengembangan layanan informasi kepegawaian daerah</p> <p>Penghargaan dan Tanda Jasa PNS</p> <p><b>Program Pelayanan Mutasi Kepegawaian</b></p> <p>Penempatan PNS</p> <p>Proses Administrasi Kepangkatan PNS</p> <p>Proses Administrasi Pensiun PNS</p> <p><b>Program Penilaian Kompetensi Aparatur</b></p> <p>Pengujian dan Penilaian Kompetensi Aparatur</p> <p>Pengembangan Asesment dan kerjasama</p> <p><b>Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi</p> <p>Tersedianya Sumber Belajar yang Memadai</p> <p>Jumlah Kerja Sama Kediklatan Meningkatkan Kompetensi Teknis Aparatur Daerah</p> <p>Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Umum dan Pilihan</p> <p>Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan</p> <p>Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan Perangkat Daerah Penunjang</p> <p>Meningkatnya Kompetensi Manajerial dan Fungsional Apartur Daerah</p> <p>Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Tk II</p> <p>Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah</p> <p>Meningkatnya Kompetensi Jabatan Fungsional</p> <p><b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</b></p> <p>Terlaksananya manajemen Keuangan dan Aset SKPD yang berkualitas</p> <p><b>Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum</b></p> <p>Terlaksananya manajemen kepegawaian dan umum</p> <p><b>Terwujudnya Anggaran Daerah Yang Berkualitas</b></p>	<p><b>BADAN PENGELOLAAN DAN ASSET DAERAH</b></p>	<p>Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi</p> <p>Pengembangan Kurikulum dan Kerjasama Kediklatan</p> <p><b>Program Pengembangan Kompetensi Teknis</b></p> <p>Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi</p> <p>Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi</p> <p>Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang</p> <p><b>Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b></p> <p>Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah</p> <p>Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan</p> <p>Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD</b></p> <p>Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Aset SKPD</p> <p><b>PROGRAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b></p> <p>Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum</p> <p><b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ANGGARAN DAERAH</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Tersedianya Buku Perda dan Pergub tentang APBD</p> <p>Tersedianya Buku Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD</p> <p>Terlaksananya Sistem Manajemen Anggaran Daerah</p> <p>Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Perda APBD Kabupaten/ Kota</p> <p><b>Terwujudnya Perbendaharaan Daerah Yang Berkualitas</b></p> <p>Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung yang berkualitas</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung yang berkualitas</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah</p> <p><b>Terwujudnya Akuntansi Keuangan Daerah Yang Berkualitas</b></p> <p>Tersedianya Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas</p> <p>Terlaksananya penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah</p> <p>Terlaksananya manajemen akuntansi yang berkualitas</p> <p>Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p><b>Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah Yang Berkualitas</b></p> <p>Tersedianya buku standar harga</p>		<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</p> <p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</p> <p>Peningkatan Manajemen Anggaran Daerah dan Pengesahan Dokumen</p> <p>Pembinaan dan Evaluasi Rancangan APBD/ Perubahan APBD Kabupaten/ Kota</p> <p><b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERBENDAHARAAN DAERAH</b></p> <p>Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung</p> <p>Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung</p> <p>Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah</p> <p><b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH</b></p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Pelaksanaan Sistem Akuntansi Manajemen</p> <p>Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <p><b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b></p> <p>Penyusunan Standar Satuan Harga</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Tersedianya Buku Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah dan Buku Rencana Perubahan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset
		Meningkatnya Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan Aset		Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah
		Meningkatnya Layanan Manajemen Aset yang tepat waktu		Peningkatan Manajemen Aset Daerah
		Meningkatnya Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Pemindahtanganan Aset Daerah
				<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>
		Terlaksananya penyelesaian TP-TGR		Penyelesaian TP-TGR
			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>
		Tersusunnya Laporan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)
		Tersusunnya Laporan		Peningkatan kualitas perencanaan Bappeda
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah
		Tersusunnya dokumen		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Tersusunnya Laporan		Sosialisasi rencana dan capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah
		Tersusunnya Laporan		Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan
				<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang bina marga, tata ruang dan penguatan BKPRD
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang perhubungan
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang KOMINFO dan LITBANG
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang Keciptakarya dan Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Tersusunnya laporan		Koordinasi pembinaan program Irigasi Partisipatif (WISMP-2) dan (IPDMIP)
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang pengendalian Kependudukan dan KB
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan mitigasi
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang energi dan sumber daya mineral
		Tersusunnya laporan		Koordinasi perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
				<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>
		Tersusunnya Dokumen		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Lintas Sektor
		Tersusunnya Dokumen		Koordinasi Perencanaan Program Pertanian, Perkebunan dan Perternakan
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan Program Kelautan dan Perikanan
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan Program Kehutanan
		Tersusunnya Dokumen		Koordinasi Perencanaan Program Perdagangan, Perindustrian dan penanaman
		Tersusunnya Dokumen		Koordinasi Perencanaan Program Koperasi, UMKM dan Pariwisata
		Tersusunnya Dokumen		Koordinasi Perencanaan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Rencana Aksi Pangan Gizi
				<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Pendidikan, Pemuda dan
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi perencanaan pembinaan kepegawaian dan peningkatan kualitas dan
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan Pembinaan dan peningkatan indeks pembangunan manusia
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi perencanaan dan pembinaan program kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program <i>sustainable development goals</i> / tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs/TPB)
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program pembangunan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Tersusunnya Laporan		Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program bidang hukum dan HAM serta
		Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi APBN bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya		<b>Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi</b> Pengendalian, monitoring dan evaluasi APBN Provinsi Sulawesi Tengah
		Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi APBN kabupaten/kota se Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya		Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan APBN kabupaten/kota
		Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional		Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional
		Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK provinsi dan kabupaten/kota se Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya		Pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK provinsi dan kabupaten/kota
		Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi APBD bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya		Pengendalian, monitoring dan evaluasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi RKPD provinsi, kabupaten/kota se Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya</p> <p>Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah Prov. Sulteng bagi perbaikan program penanggulangan kemiskinan periode</p> <p>Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi RAD-Pangan Gizi Prov. Sulteng bagi perbaikan perencanaan pangan gizi periode berikutnya</p> <p>Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi RAD-SDGs Prov. Sulteng bagi perbaikan SDGs periode berikutnya</p>		<p>Pengendalian, monitoring dan evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Pengendalian, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah</p> <p>Evaluasi, monitoring dan evaluasi RAD-Pangan Gizi</p> <p>Pengendalian, monitoring dan evaluasi RAD-<i>sustainable development goals (SDGs)</i></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
II	<p>Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan,</p>	<p>Meningkatnya pelayanan, Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>Jumlah Patroli Wilayah Jumlah Laporan Tim Koordinasi Tibumtranmas</p> <p>Meningkatnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Terselenggaranya penegakan peraturan daerah / peraturan kepala daerah</p> <p>Terwujudnya kerjasama antar lembaga dalam penegakan peraturan daerah / peraturan kepala daerah</p> <p>Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan</p> <p>Terselenggaranya kegiatan</p> <p>Tersedianya data anggota satlinmas kab/kota</p> <p>Meningkatnya Pembinaan masyarakat Terselenggaranya kegiatan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat</p> <p>Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap standar pelayanan minimal</p>	<p><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b></p>	<p><b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b></p> <p>1 Pembinaan Kantrantibmas 2 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tibumtranmas</p> <p><b>Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah</b></p> <p>1 Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>2 Peningkatan Hubungan Kerja sama</p> <p><b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan</b></p> <p>1 Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam 2 Monitoring dan Evaluasi Potensi Satlinmas</p> <p><b>Program Pembinaan Masyarakat</b></p> <p>1 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 2 Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat</p> <p><b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b></p> <p>1 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pencegahan kebakaran</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>Laporan EKK dan laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan</p> <p>Laporan fasilitasi administrasi dan inventarisasi pengembangan kawasan</p> <p>Laporan hasil pembinaan dan penamaan toponimi Laporan hasil pembinaan dan fasilitasi penataan batas daerah Laporan hasil fasilitasi penyusunan data dan kode wilayah</p> <p>Laporan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemerintahan Laporan koordinasi dan fasilitasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah Laporan pelaksanaan fasilitasi administrasi kerjasama pemerintah provinsi</p> <p>- Jumlah Laporan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat dan Tokoh Masyarakat - Terlaksananya Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan - Persentase Jumlah Rapat-rapat Paripurna</p>	<p><b>BIRO ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b></p> <p><b>SEKRETARIAT DPRD</b></p>	<p>2 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p><b>Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan</b> Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p> <p><b>Program Fasilitasi Administrasi Pengembangan Kawasan</b> Fasilitasi Administrasi dan Inventarisasi Pengembangan Kawasan</p> <p><b>Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Kewilayahan</b> Pembinaan dan Penamaan Toponimi Pembinaan dan fasilitasi penataan batas daerah</p> <p>Fasilitasi Data dan Kode Wilayah</p> <p><b>Program Pembinaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama</b> Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Koordinasi dan Fasilitasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Fasilitasi Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi</p> <p><b>Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD:</b> 1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Masyarakat/ Tokoh Agama 2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3. Rapat-rapat paripurna</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>- Jumlah Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Masing-masing Daerah Pemilihan</p> <p>- Terlaksananya Kunjungan Kerja Anggota Dewan</p> <p>- Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Peningkatan kapasitas</p> <p>- Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan</p> <p>- Terlaksananya Publikasi Peraturan PerUndang-Undangan</p> <p>Terkelolanya isu Publik bidang Pemerintahan kemasyarakatan dan Pembangunan ; Tersedianya data isu publik</p> <p>Meningkatnya Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi</p> <p>Tersedianya Dokumen Foto Kegiatan Kepemerintahan</p> <p>Peningkatan Kerjasama dengan mass media</p>	<p><b>BIRO HUMAS</b></p>	<p>4. Kegiatan Reses</p> <p>5. Kunjungan kerja Pimp. dan anggota DPRD dalam daerah</p> <p>6. Peningkatan kapasitas Pimp. Dan anggota DPRD</p> <p><b>Penataan Peraturan Perundang- Undangan</b></p> <p>1. Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan</p> <p>2. Publikasi dan Dokumentasi Produk DPRD</p> <p><b>Program:</b></p> <p><b>Peningkatan Kualitas</b></p> <p><b>Pelayanan Informasi</b></p> <p>Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan</p> <p><b>Program:</b></p> <p><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b></p> <p>Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</p> <p><b>Program:</b></p> <p><b>Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Dokumentasi</b></p> <p>Kegiatan: Pengelolaan Dokumentasi Foto</p> <p>Kegiatan Pemerintahan</p> <p><b>Program:</b></p> <p><b>Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlatihnya Aparatur Pengawasan</p> <p>Tersusunnya Sistem dan prosedur pengawasan</p> <p>Tersusunnya inventarisasi pengaduan masyarakat dan Laporan Inspres No. 5 tahun</p> <p>Tersusunnya inventarisasi pengaduan masyarakat dan laporan</p> <p><b>Tertanganinya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda</b></p> <p>Tertanganinya Perkara dilingkungan Pemda</p> <p>Meningkatnya Pemahaman Aparatur atas Perlindungan Hukum</p> <p>Meningkatkan Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Daerah</p> <p>Terselenggaranya Penyuluhan Hukum</p> <p><b>Jumlah Produk Hukum yang Tersosialisasi</b></p> <p>Tersedianya Rancangan Terlaksananya Bintek Penyusunan Produk Hukum dan Terselenggaranya Rakor Prolegda di Sulawesi Tengah</p> <p>Tersusunnya Raperda dan Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Serta Fasilitasi Ranpergub</p> <p>Tersosialisasinya Perda/Pergub</p> <p>Terpublikasinya Produk Hukum Prov. Sulteng</p>	<p><b>INSPEKTORAT DAERAH</b></p> <p><b>BIRO HUKUM</b></p>	<p>Kegiatan: Kerjasama dengan mass Media</p> <p><b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa Aparatur</b></p> <p>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa aparatur</p> <p><b>Program Penataan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur</b></p> <p>Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan</p> <p><b>Program mengintensifkan penanganan pe+C2ngaduan masyarakat.</b></p> <p>Pembentukan Unit Khusus pengaduan masyarakat</p> <p><b>Program Bantuan Hukum</b></p> <p>Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi dilingkungan Pemda</p> <p>Bimtek Pelayanan dan Perlindungan Hukum</p> <p>Monitoring dan Pengawasan HAM</p> <p>Penyuluhan Hukum</p> <p><b>Program Produk Hukum Daerah Provinsi</b></p> <p>Penyusunan dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Rakor PROLEGDA</p> <p>Penyusunan, Fasilitasi dan Evaluasi Ranperda dan Ranpergub</p> <p>Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi</p> <p>Publikasi Produk Hukum Daerah Propinsi</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p><b>Sesuaiinya Produk Hukum Kabupaten /Kota dengan</b></p> <p>Terlaksananya Evaluasi,Fasilitasi,Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I</p> <p>Terlaksananya Evaluasi,Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II</p>		<p><b>Program Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Evaluasi,Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I</p> <p>Evaluasi,Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
III	<p><b>Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota</b></p>	<p>Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis</p> <p>Jumlah dokumen data base jalan</p> <p>Jumlah dokumen data base jembatan</p> <p>Panjang jalan provinsi yang dileger</p> <p>Jumlah dokumen evaluasi keselamatan jalan</p> <p>Jumlah dokumen teknik lingkungan jalan</p> <p>Jumlah laporan pembinaan jalan kabupaten/kota</p> <p>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Kab/Kota</p> <p>Panjang jalan yang dipelihara</p> <p>Panjang jalan yang dipelihara</p> <p>Panjang peningkatan jalan</p> <p>Panjang jalan yang dibangun</p> <p>Panjang peningkatan jalan</p> <p>Panjang jalan yang dibangun</p> <p>Jumlah jembatan yang dipelihara</p> <p>Jumlah jembatan yang dipelihara</p> <p>Panjang penggantian jembatan</p> <p>Jumlah alat-alat berat yang diadakan</p> <p>Jumlah alat-alat berat yang dipelihara</p> <p>Jumlah peserta/Kab/Kota sosialisasi peraturan jasa konstruksi</p> <p>Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah</p>	<p><b>DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG</b></p>	<p><b>Program Penyelenggaraan Jalan</b></p> <p>Perencanaan Pembangunan Jalan</p> <p>Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan</p> <p>Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan</p> <p>Penyiapan Leger Jalan dan Jembatan</p> <p>Penyusunan Evaluasi Keselamatan Jalan</p> <p>Pembinaan Teknik Lingkungan Jalan</p> <p>Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota</p> <p>Pemeliharaan Jalan Wilayah I</p> <p>Pemeliharaan Jalan Wilayah II</p> <p>Peningkatan Jalan Wilayah I</p> <p>Pembangunan Jalan Wilayah I</p> <p>Peningkatan Jalan Wilayah II</p> <p>Pembangunan Jalan Wilayah II</p> <p>Pemeliharaan Jembatan Wilayah I</p> <p>Pemeliharaan Jembatan Wilayah II</p> <p>Penggantian Jembatan Wilayah I</p> <p>Pengadaan Alat-alat Berat dan Bahan Jalan</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat</p> <p><b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b></p> <p>Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya</p> <p>Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan penyedia jasa konstruksi</p> <p>Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi</p> <p>Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK)</p> <p>Jumlah laporan evaluasi kinerja pelaksana jasa konstruksi di daerah</p> <p>Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan ketentuan teknik (manajemen mutu)</p> <p>Jumlah pengujian bahan bangunan dan konstruksi</p> <p>Jumlah laporan uji mutu infrastruktur jalan</p> <p>Terpenuhinya persyaratan persetujuan substansi rencana rinci</p> <p>Terpenuhinya aspek legalitas rencana tata ruang</p> <p>Meningkatnya pemahaman aparatur dalam menerapkan regulasi/NSPK perencanaan tata ruang</p> <p>Meningkatnya kualitas SDM dalam aspek perencanaan tata ruang</p> <p>Tersusunnya kondisi, hambatan, dan kendala perencanaan tata ruang di provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>Terpenuhinya aspek legalitas rencana tata ruang</p> <p>Tersedianya data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang di kab/kota</p>		<p><b>Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b></p> <p>Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi</p> <p>Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi</p> <p>Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi</p> <p><b>Program Pengawasan Jasa Konstruksi</b></p> <p>Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan</p> <p><b>UPT Laboratorium</b></p> <p><b>Program Pelayanan Pengujian</b></p> <p>Pelayanan Pengujian</p> <p>Pengendalian Mutu</p> <p><b>Penataan Ruang</b></p> <p><b>Program Perencanaan Tata Ruang</b></p> <p>Penyusunan Penetapan KLHS rencana tata ruang</p> <p>Penyusunan Raperda rencana tata ruang</p> <p>Penyusunan NSPK perencanaan tata ruang</p> <p>Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang</p> <p>Penetapan Raperda rencana tata ruang</p> <p><b>Program Pemanfaatan Ruang</b></p> <p>Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Tersedianya data ruang terbuka hijau perkotaan</p> <p>Terlaksananya konsolidasi terhadap pemanfaatan ruang</p> <p>Tersedianya informasi pemanfaatan ruang</p> <p>Jumlah laporan akhir yang tersusun</p> <p>Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang memahami proses pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>Meningkatnya kinerja Pokja pengendalian BKPRD dalam proses pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>Jumlah laporan akhir yang tersusun</p> <p>Jumlah aparatur yang memahami proses pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>Jumlah kasus yang tertangani</p> <p>panjang drainase terbangun (m)</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan IPLT Regional</p> <p>Jumlah Kawasan yang terlayani air minum</p> <p>Jumlah Kawasanyang terlayani air limbah</p> <p>Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan (jumlah laporan)</p>	<p><b>DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBERDAYA AIR</b></p>	<p>Penyusunan NSPK pemanfaatan ruang</p> <p>Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang</p> <p>Audit pemanfaatan ruang</p> <p><b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b></p> <p>Pengawasan teknis dan pengawasan khusus pemanfaatan ruang</p> <p>Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>Penguatan kelembagaan Pokja pengendalian pemanfaatan ruang (BKPRD)</p> <p>Monitoring evaluasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>Pelatihan aparat dalam pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>Operasinalisi PPNS dalam penertiban pemanfaatan ruang</p> <p><b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b></p> <p>Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</p> <p><b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b></p> <p>Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah</p> <p>Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum</p> <p>Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah</p> <p>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Kawasan permukiman yang terlayani sarpras persampahan</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman dan bangunan gedung</p> <p>Jumlah kawasan strategis Provinsi yang tertangani jumlah bangunan gedung yang bersifat strategis Provinsi yang tertangani</p> <p>Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan (jumlah laporan)</p> <p>Terlaksananya Pelatihan di Bidang Administrasi, Keuangan dan Teknis</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan Air Minum</p> <p>Laporan rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Data profil</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan untuk pengelolaan irigasi</p> <p>Dana Penunjang Paket Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Daerah Irigasi</p> <p>- Terlaksananya Pelatihan/ Pembekalan Staf Pengelola Irigasi &amp; Rawa</p> <p>Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif</p> <p>Pelaksanaan Rapat dan Sidang TKPSDA Wilayah Sungai</p>		<p><b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b> Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan</p> <p><b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b> Perencanaan Pengembangan Infrastruktur</p> <p>Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur</p> <p>Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p><b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b> Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum</p> <p><b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Sinkronisasi Program ke-PU-an</p> <p><b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi</p> <p>Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi</p> <p>Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa</p> <p>Pengelolaan Perkuatan Irigasi Partisipatif (WISMP)</p> <p>Pengembangan Kelembagaan Tata Guna air</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terbangunnya Prasarana pengambilan, penampungan, dan saluran pembawa air baku</p> <p>Dokumen Perencanaan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan sungai dan pantai</p> <p>Dokumen Perencanaan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Bak Penampung dan Saluran Pembawa</p> <p>Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Penetapan Daerah Sempadan Sungai pada Wilayah Sungai kewenangan provinsi</p> <p>Jumlah Bangunan Pengendalian Banjir, Panjang Sungai yang dinormalisasi</p> <p>Jumlah lokasi/ panjang pengaman pantai yang dibangun</p> <p>1.Kampanye Kepedulian Publik Tingkat Masyarakat Terbentuknya SATGAS Rawan Banjir pada Dinas SDA dan Terlaksananya Sosialisasi Masyarakat Rawan Banjir</p> <p>Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran</p>		<p>Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)</p> <p><b>Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku</b></p> <p>Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa</p> <p><b>Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya</b></p> <p>Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai</p> <p>Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku</p> <p>Kajian Sempadan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya Serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Air Lainnya</p> <p><b>Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai</b></p> <p>Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai</p> <p>Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai</p> <p>Pembinaan Masyarakat Rawan Banjir</p> <p><b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b></p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Tersedianya data-data kepegawaian</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Jumlah jaringan Irigasi yang terpelihara</p> <p>Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai dan Pantai</p> <p>Terbangunnya/Terlaksananya Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai</p> <p>Publikasi Data Hidrologi, terkumpulnya data curah hujan harian, mingguan dan bulanan serta terukurnya debit sesaat</p> <p>Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran</p> <p>Tersedianya data-data kepegawaian</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Jumlah jaringan Irigasi yang terpelihara</p>		<p><b>Program peningkatan disiplin aparatur</b> Peningkatan Administrasi Kepegawaian</p> <p><b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p><b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> OP Jaringan Irigasi (UPT PSDA Wilayah-I)</p> <p><b>Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya</b> Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah I</p> <p><b>Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai</b> Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-I)</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol</p> <p><b>UPT SUMBER DAYA AIR WILAYAH II</b> <b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p><b>Program peningkatan disiplin aparatur</b> Peningkatan Administrasi Kepegawaian</p> <p><b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p><b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> OP Jaringan Irigasi (UPT PSDA Wilayah-II)</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai dan Pantai</p> <p>Terbangunnya/Terlaksananya Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai</p> <p>Publikasi Data Hidrologi, terkumpulnya data curah hujan harian, mingguan dan bulanan serta terukurnya debit sesaat</p> <p>Terkendalinya pengembangan perumahan dan lingkungan Terlaksananya penyediaan bantuan Perumahan</p> <p>Terlaksananya pembangunan sarana, prasarana rumah dan sarana utilitas permukiman Terlaksananya program monitoring dan evaluasi Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan DED (Detail Engineering Desain) Rusun dan Rusus</p> <p>Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitasi dasar berbasis masyarakat miskin</p> <p>Terpenuhinya sarana dan prasarana utilitas permukiman kumuh</p>	<p><b>DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b></p>	<p><b>Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya</b> Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah II</p> <p><b>Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai</b> Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-II)</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bongka Mentawa</p> <p><b>Program Pengembangan Perumahan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman Sinkronisasi Program, Monitoring, dan Evaluasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Perencana Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pengembangan Perumahan</p> <p><b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b> Penyediaan Saran air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin</p> <p>Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh</p> <p><b>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya rehabilitasi rumah akibat bencana alam</p> <p>Terlaksananya program monitoring dan evaluasi</p> <p>Terlaksananya penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya</p> <p>Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan</p> <p>Terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan</p> <p>Tersedianya sistem informasi pertanahan</p> <p>Termanfaatkannya Dokumen Monitoring Isu Publik</p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat</p> <p>Terlaksananya Penyediaan Konten dan Media Komunikasi</p> <p>Terlaksananya Pengolahan dan Analisis data informasi Pendukung Komunikasi Publik lintas sektoral</p> <p>Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah</p>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b></p>	<p>Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p><b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah</b></p> <p>Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>Penyuluhan hukum pertanahan</p> <p><b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b></p> <p>Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</p> <p><b>Program Pengembangan sistem informasi pertanahan</b></p> <p>Penyusunan Sistem informasi pertanahan</p> <p><b>Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik</b></p> <p>Monitoring Isu Publik,</p> <p>Pengumpulan Pendapat umum dan Pengelolaan aduan masyarakat</p> <p><b>Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi</b></p> <p>Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p> <p>Pengolahan dan analisis data Informasi pendukung komunikasi publik lintas sektoral</p> <p><b>Program Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik</b></p> <p>Pengendalian Keterbukaan Informasi Publik</p> <p><b>Program Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik</b></p> <p>Pengelolaan Saluran Komunikasi pemerintah daerah</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah</p> <p>Terlaksananya Penyelenggaraan Inovasi TIK</p> <p>Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur e-government</p> <p>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TIK</p> <p>Terlaksananya pengelolaan akses internet dan intranet Pemerintah dan Publik</p> <p>Tersedianya Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah</p> <p>Terlaksananya Pengembangan dan Pengolahan aplikasi</p> <p>Terlaksananya layanan informasi e-Government</p> <p>Terlaksananya Integrasi layanan publik dan pemerintahan</p> <p>Tersedianya layanan keamanan informasi</p> <p>Terselenggaranya Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif</p> <p>Terlaksananya Pemberdayaan Sistem Komunikasi Pemerintah</p> <p>Terselenggaranya Kemitraan dan Hubungan Media</p> <p>Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik</p>		<p>Diseminasi informasi kebijakan pemerintah dan Non pemerintah</p> <p><b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK</b> Penyelenggaraan Dan Inovasi TIK</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur e-Government</p> <p>Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TIK</p> <p>Pengelolaan akses internet dan intranet pemerintah dan publik</p> <p>Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah</p> <p><b>Program Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi e-Government</b> Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi</p> <p>Layanan Manajemen Data Informasi e-Government Integrasi layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi</p> <p><b>Program Keamanan Informasi e-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi</b> Layanan keamanan informasi e-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi</p> <p>Pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif</p> <p>Pemberdayaan Sistem Komunikasi Pemerintah</p> <p><b>Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik</b> Kemitraan dan Hubungan Media</p> <p>Pelayanan Informasi Publik</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi Pimpinan Daerah</p> <p>Meningkatnya Penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</p> <p>Jumlah Layanan nama Domain dan Sub. Domain</p> <p>Terselenggaranya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Terlaksananya Ekosistem TIK Smart Province</p> <p>Jumlah Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian</p> <p>Terlaksananya Operasional Pengamanan Persandian</p> <p>Jumlah Pengelolaan Statistik Daerah</p>		<p>Pengelolaan Komunikasi Pimpinan Daerah</p> <p><b>Program Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</b></p> <p>Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat</p> <p><b>Program Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi</b> Penyediaan Akses Informasi Layanan Nama Domain dan Sub domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Provinsi</p> <p><b>Program Tata Kelola dan Ekosistem TIK</b> Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province</p> <p><b>Program Penyelenggaraan Sistem Persandian Daerah</b> Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian</p> <p>Operasional Pengamanan Persandian</p> <p><b>Program Pengelolaan Statistik dan Layanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah</b></p> <p>Penyelenggaraan Statistik Daerah</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
IV	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	<p>Tersedianya Data Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara</p> <p>Terciptanya pembinaan dan supervisi optimal terhadap perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan batubara</p> <p>Teridentifikasinya perusahaan tambang yang memiliki IUP</p> <p>Terwujudnya kegiatan reklamasi pasca tambang yang terkontrol dan ramah lingkungan</p> <p>Berkurangnya Luasan Lahan Terganggu</p> <p>Tersedianya data ketenagalistrikan daerah yang lengkap</p> <p>Tersedianya data detail pembangunan listrik perdesaan</p> <p>Tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan on grid</p> <p>Terwujudnya Pembinaan Ketenagalistrikan</p> <p>Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Energi</p> <p>Meningkatnya Pengelolaan dan Pengusahaan Energi</p> <p>Tersedianya Data Pengelolaan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan</p> <p>Terciptanya Pemahaman Masyarakat untuk melakukan Penghematan Penggunaan Energi</p>	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	<p><b>Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan</b></p> <p>Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara</p> <p>Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p> <p>Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara</p> <p>Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan</p> <p>Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat</p> <p><b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan</b></p> <p>Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan</p> <p>Survey Pengembangan Ketenagalistrikan</p> <p>Pengusahaan Ketenagalistrikan</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan</p> <p><b>Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)</b></p> <p>Pengembangan Kegiatan Energi</p> <p>Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian Program Konservasi Energi</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Tersedianya data geologi dan air tanah</p> <p>Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih bagi masyarakat dan daerah sulit air</p> <p>Tersedianya Peta Zona Konservasi Air Tanah</p> <p>Terciptanya ketertiban dalam pengelolaan perusahaan air tanah</p>		<p><b>Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah</b></p> <p>Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah</p> <p>Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah</p> <p>Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah</p> <p>Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
V	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	<p>Terlaksananya Penataan Desa</p> <p>Tersedianya Data dan Informasi Desa</p> <p>Terwujudnya Penataan Buku Registrasi administrasi desa</p> <p>Tersedianya Pengelola Keuangan dan Penataan Asset Desa</p> <p><b>Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa</b></p> <p>Terlaksananya PIN Desa</p> <p>Terwujudnya Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan</p> <p>Terwujudnya Koordinasi Evaluasi Perkembangan Desa</p> <p><b>Tersedianya Pengelolaan Data Desa</b></p> <p>Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan</p> <p>Tersedianya Pengelola Data Desa</p> <p>Terwujudnya Data Real Desa</p> <p><b>Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa</b></p> <p>Terwujudnya Tata Kelola Administrasi desa</p> <p>Tersedianya Pengelola Sistem Informasi Desa</p> <p>Tersedianya Data Real Administrasi Desa</p> <p><b>Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik</b></p> <p>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa</p> <p>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Peran BPD</p>	<p><b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b></p>	<p><b>Program Penataan Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa</li> <li>- Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa</li> </ul> <p><b>Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekan Inovasi Desa ( PIN DESA )</li> <li>- Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan</li> <li>- Rakor Evaluasi Perkembangan Desa</li> </ul> <p><b>Program Pengelolaan Data Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan</li> <li>- Bimbingan Tekhnis tentang Pengelolaan Data Desa</li> <li>- Rakor Pengelolaan dan Pemutakhiran data Desa</li> </ul> <p><b>Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa</li> <li>- Bimtek pengelolaan Sistem informasi Administrasi Desa</li> <li>- Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa</li> </ul> <p><b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitasi Peran Badan Permusyawaratan Desa</li> </ul>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan Desa</p> <p><b>Terwujudnya Kerjasama antar Desa</b></p> <p>Terwujudnya Penguatan Kelembagaan BKAD</p> <p>Terwujudnya Kerjasama antar Desa</p> <p><b>Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa</b></p> <p>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan PKK</p> <p>Terlaksananya Pembinaan LPMD/K</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat</p> <p>Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Posyandu</p> <p><b>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa</b></p> <p>Tersedianya Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p> <p><b>Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat</b></p> <p>Terlaksananya GN-BBGRM</p> <p>Terlaksananya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa</p> <p>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas POKJA HIV AIDS</p> <p><b>Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</b></p> <p>Tersedianya Infrastruktur Perdesaan</p>		<p>- Rakor PEMDES</p> <p><b>Program Kerjasama Desa</b></p> <p>- Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa</p> <p>- Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa</p> <p><b>Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan</b></p> <p>- Pembinaan Kelembagaan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )</p> <p>- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan LPMD/K</p> <p>- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat</p> <p>- Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU)</p> <p><b>Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat</b></p> <p>- Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )</p> <p>- Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p> <p><b>Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat</b></p> <p>- Pembinaan dan Pencanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )</p> <p>- Pembinaan dan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa</p> <p>- Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS</p> <p><b>Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</b></p> <p>- Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>Terwujudnya Koordinasi, Konservasi dan Rehabilitasi SDA dan Lingkungan Perdesaan</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>Terlaksananya P3MD</p> <p>Terwujudnya Kerjasama antar kawasan perdesaan</p> <p>Terselenggaranya sosialisasi</p> <p><b>Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Desa dan Penanggulangan Kemiskinan</b></p> <p>Terbentuknya TKPKD</p> <p>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan</p> <p>Terlaksananya peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan</p> <p>Terwujudnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>Meningkatnya akses permodalan di Desa</p> <p><b>Terlaksananya Pengembangan TTG dan SDA</b></p> <p>Tersedianya Dokumen Pengkajian dan Pengembangan TTG</p> <p>Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG</p> <p>Terbentuknya Posyantek</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan</li> <li>- Fasilitas, Konservasi dan Rehabilitasi SDA dan Lingkungan Perdesaan</li> <li>- Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</li> <li>- Pembinaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD)</li> <li>- Fasilitas Kerjasama antar kawasan Perdesaan</li> <li>- Sosialisasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</li> </ul> <p><b>Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>- Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan</li> <li>- Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan</li> <li>- Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</li> <li>- Peningkatan Akses Permodalan Desa</li> </ul> <p><b>Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan Pengembangan TTG Melalui Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Terkait</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna</li> <li>- Penguatan Kelembagaan Posyantek</li> </ul>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terselenggaranya TMMD</p> <p>Terlaksananya Gelar TTG dan Expo</p> <p>Terkelolanya SDA melalui program PAMSIMAS</p> <p>Terbinanya masyarakat pesisir dan daratan dalam pemanfaatan pengelolaan SDA</p> <p>Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan</p> <p>Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan</p> <p>Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin pesisir dan pulau-pulau</p> <p>Terselenggarana tolksow untuk UGB dan PUB di Sulteng</p> <p>Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan kepahlawanan</p> <p>Terbentuknya satu family Care Unit</p> <p>Terlaksananya bimbingan PSM</p> <p>Terlaksananya bimbingan manajemen orsos dan seleksi Orsos berprestasi</p> <p>Terlaksananya pembinaan KT</p> <p>terlaksananya pertemuan jaringan kerja dan bhakti sosial TKSK</p> <p>Tersedianya bantuan bencana</p>	<p><b>DINAS SOSIAL</b></p>	<p>- Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa</p> <p>- Gelar Teknologi Tepat Guna dan Expo</p> <p>- Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Program PAMSIMAS</p> <p><b>- pembinaan dan Pembedayaan masyarakat dlm pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pantai,pesisir dan daratan</b></p> <p><b>Program Pembedayaan Fakir</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan</li> <li>2. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau</li> </ol> <p><b>Program Pembedayaan Sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku - pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat</li> <li>2. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial</li> <li>3. Pembedayaan Sosial Peranan Keluarga</li> </ol> <p><b>Program Pembinaan Potensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembedayaan Pekerja Sosial Masyarakat</li> <li>2. Pembedayaan Organsasi Sosial</li> <li>3. Pembedayaan karang Taruna</li> <li>4. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan</li> </ol> <p><b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Masalah - masalah Strategi Yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa</li> </ol>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Tersusunnya rencana aksi daerah pencegahan konflik sosial di satu kabupaten dan pemulangan orang terlantar</p> <p>Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PKH dan tersusunnya study assesment resertifikasi peserta PKH</p> <p>Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan sosial bagi KTK dan korban perdagangan orang</p> <p>Terlaksananya sosialisasi PMKS serta penyuluhan sosial</p> <p>Tersedianya calon pekerja sosial</p> <p>Terlaksananya monitoring dan evauasi pelaksanaan kegiatan</p> <p>Tersedianya data peserta PBI dan PMKS, PSKS</p> <p>Terlaksananya pelayanan sosial dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas</p> <p>Terlaksananya pemberian bantuan bagi WTS dan Eks Napi serta bimbingan rehsos bagi eks Napza</p> <p>Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Komptenesi (orang)</p> <p>Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan</p>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b></p>	<p>2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial</p> <p>3. Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga</p> <p><b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b></p> <p>1. Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia terlantar</p> <p>2. Rehabiitasi Sosial Anak Terlantar</p> <p>3. Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan orang</p> <p><b>Program Penyuluhan Sosial</b></p> <p>1. Penyuluhan sosial</p> <p>2. Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial</p> <p><b>Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial</b></p> <p>1. Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan</p> <p>2. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial</p> <p><b>Program Pembinaan Para</b></p> <p>1. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat</p> <p><b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</b></p> <p>1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</p> <p><b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (Orang)		
		<p>Para Pencari Kerja untuk Ditingkatkan Kemampuannya</p> <p>Lembaga Pelatihan Kerja Mendapatkan Pengakuan/Terakreditasi</p> <p>Membina dan Meningkatkan Kemampuan</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Magang Jepang</p> <p>Terlaksananya Bimtek Penyusunan dan Penerapan Modul Berbasis Kompetensi</p> <p>Jumlah Pendampingan Asesor yang ditingkatkan Pengetahuannya</p> <p>Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>Meningkatkan Pengetahuan Tenaga Kerja Alumni LPK</p> <p>Tersedianya Database LPK Kab/Kota</p> <p>Terlaksananya Kegiatan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</p> <p>Besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan (orang)</p> <p>Tersedianya Data Informasi Pasar Kerja</p> <p>Tersusunnya Profil Tenaga Kerja</p> <p>Meningkatkan Pengetahuan Peran dan Fungsi Pelayanan Penempatan pada Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, Perguruan Tinggi dan LPK</p>		<p>1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja</p> <p>2. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p><b>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b></p> <p>1. Penempatan Tenaga Kerja</p>



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		gaa dan Pend. Hub. Industrial		
		<p>Terlaksananya Temu Konsultasi Organisasi Pekerja/Buruh, Pengusaha dan Pemerintah</p> <p>Terlaksananya Bimtek Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit</p> <p>Terlaksananya Bimtek Pembentukan SP/SB</p> <p>Terlaksananya Bimtek Manajemen</p> <p>Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja</p> <p>Terlaksananya Bimtek Penerapan SMK3</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan TK terhadap K3 Konstruksi</p> <p>Terlaksananya Bimtek Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan K3 dan Lingk. Kerja</p> <p>Terlaksananya Bimtek K3 Teknisi Listrik</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan tentang Norma Ketenagakerjaan Jamsos</p> <p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>Terlaksananya Bimtek Survey KHL</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan tentang Proses Penetapan UMP/UKM</p>		<p>2. Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tenaga Kerja</p> <p>3. Pengkajian dan Penetapan UMP</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Meningkatnya Pengetahuan tentang Syarat Kerja bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh</p> <p>Terlaksananya Dewan Pengupahan yang Efektif Terwujudnya Pelaksanaan UMK</p> <p>Tersedianya Data KHL</p> <p>Jumlah Permukiman Transmigrasi</p> <p>Jumlah KK Transmigrasi</p> <p>Data Tanah untuk Transmigrasi</p> <p>Dokumen Perencanaan Kawasan</p> <p>Lokasi yang siap ditempati</p> <p>Jumlah Saprasi yang dibangun di Lokasi Transmigrasi</p> <p>Jumlah Saprasi pada Kawasan Trans yang Telah direncanakan</p> <p>Laporan Hasil Rapat Data Saprasi yang Terinventarisasi</p> <p>Dokumen KSAD</p> <p>Data Usulan Penjaringan Program</p> <p>Jumlah Lokasi Permukiman Trans yang di Monev</p> <p>Dokumen Evaluasi</p> <p>Jumlah ketersediaan Sarana Prasarana permukiman/ perumahan dan Fasilitas</p>		<p><b>Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Tanah, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan</li> <li>2. Pembangunan Permukiman Transmigrasi</li> <li>3. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk</li> </ol> <p><b>Program Pembangunan Daerah Tertinggal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal</li> </ol>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Umum Permukiman Daerah Tertinggal		
		<p>Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal</p> <p>Menurunnya Presentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal</p> <p>Jumlah Data UPT Bina</p> <p>Jumlah Transmigran Terbina Usaha</p> <p>Jumlah LP, LU I dan LU II yang Tertata</p> <p>Jumlah Koperasi yang Terbina</p> <p>Jumlah Paket A, B dan C yang Terbina</p> <p>Terlaksananya Monev Pendisbusian Jadup</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan tentang Penyakit Schistosomiasis</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan tentang Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Meningkatnya Pemahaman terhadap Mental Spiritual</p> <p>Meningkatnya Kapasitas Guru</p> <p>Meningkatkan Pengetahuan warga Trans terhadap Saprasi di Kawasan Transmigrasi</p> <p>Tersedianya Data Saprasi di Kaw. Trans</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Saprasi di Kaw. Transmigrasi</p>		<p>2. Pengembangan Sumberdaya Manusia</p> <p>3. Peningkatan Ekonomi Lokal dan Sumberdaya Alam</p> <p><b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b></p> <p>1 Pengembangan Usaha Ekonomi</p> <p>2 Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya</p> <p>3 Pengembangan Sarana dan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Terpeliharanya Fungsi Rumah Ibadah  Terpeliharanya Taman Rumah Singgah		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
VI	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly	<p>Nilai realisasi Investasi</p> <p>- PMA - PMDN Jumlah Perusahaan yang berinvestasi - PMA - PMDN</p> <p>Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal</p> <p>Rumusan dan kajian kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha</p> <p>sosialisasi kebijakan penanaman modal Tersedianya data mitra usaha daerah dokumen rumusan strategi promosi penanaman modal dan terlaksananya sosialisasi promosi investasi</p> <p>Terlaksananya Event promosi pameran investasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri Tersedianya bahan promosi pameran</p> <p>terlaksananya monitoring, pemantauan dan penyuluhan terhadap perusahaan PMA/PMDN laporan penyelesaian masalah penanaman modal dan bimbingan kegiatan penanaman modal lainnya.</p>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL</b></p> <p>1 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal</p> <p>2 Fasilitasi Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal</p> <p>3 Koordinasi dan fasilitasi kemitraan dunia usaha</p> <p>4 Peningkatan kualitas strategi dan pengembangan promosi penanaman modal</p> <p>5 Penyelenggaraan pameran promosi Penanaman Modal</p> <p>6 Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal</p> <p>7 Penyelenggaraan pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal</p> <p>8 penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian masalah dan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan laporan hasil analisis dan evaluasi data penanaman modal dan perizinan - non perizinan</p> <p>Terlaksananya Pemutakhiran Sistem Informasi Potensi Investasi dan sosialisasi Dokumen/buku peta potensi investasi daerah</p> <p>- Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Sektor Izin Usaha Sektor Izin Non Usaha Terlaksananya PTSP dan Penyederhanaan Sistem Pelayanan Terpadu</p> <p>- Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Layanan perizinan dan non perizinan dengan aplikasi SPIPISE, SIPPADU, SIMKADA dan sistem lainnya Tersedianya layanan pengaduan dan informasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan laporan pelaksanaan advokas, kebijakan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan Laporan pengembangan, pengendalian, mutu dan standar layanan serta inovasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan</p> <p><b>Pertumbuhan Industri Besar</b></p> <p>- Terencananya Pembangunan Industri Provinsi</p>	<p><b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b></p>	<p>9 penyelenggaraan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal</p> <p>10 Pengolahan dan penyusunan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan</p> <p>11 Penyusunan analisis dan evaluasi data penanaman modal dan perizinan - non perizinan</p> <p>12 penyusunan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)</p> <p>13 Penyusunan peta potensi investasi daerah</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b></p> <p>1 Fasilitasi pelayanan Perizinan dan non perizinan</p> <p>2 Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berbasis IT</p> <p>3 Fasilitasi layanan pengaduan dan informasi perizinan dan non perizinan</p> <p>4 Penyelenggaraan advokasi, kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan dan non perizinan</p> <p>5 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p><b>Program Penataan Struktur Industri</b></p> <p>Kebijakan Pengembangan Usaha Industri</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terfasilitasinya Konektivitas antar Pelaku Industri di Sulawesi Tengah</li>   <li>-Terjadinya Sistim Informasi Industri Provinsi Sulteng</li>   <li>-Terpromosinya Produk - produk Unggulan Sulteng</li> <li>- Meningkatnya pelaku industri e-comerse di Sulteng</li>   <li><b>Fasilitasi Penguatan industri</b></li>   <li>- Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparat dan Pelaku Industri</li> <li>- meningkatnya legalisasi usaha industri sulawesi tengah</li> <li>- Meningkatnya penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri</li> <li>- Meningkatnya dan berkembangnya serta termanfaatkannya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri</li> <li>- Meningkatnya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Standardisasi Industri</li>   <li>- Terjadinya Penumbuhan dan Penyebaran Industri di wilayah Pertumbuhan Industri Sulawesi Tengah</li>   <li>- Terjadinya peningkatan dan penguatan komoditi di lintas kabupaten</li>   <li><b>Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Pengembangan Industri</li>   <li>Sistem Informasi dan Promosi Industri</li>   <li>Industri E-komersial</li>   <li><b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b></li>   <li>Penguatan Sarana Industri</li>   <li>Pembinaan, Pengembangan dan pelayanan teknologi Industri</li>   <li>Perluasan Penerapan Standar Industri</li>   <li>Pembinaan dan pengembangan perwilayahan industri</li>   <li><b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b></li> </ul>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya rapat stabilitas harga Komoditi di Daerah</p> <p>Terlaksananya koord stabilitas harga daerah di kementerian</p> <p>Terlaksananya rapat Efektifitas Prognosis BAPOKTING</p> <p>Terlaksananya monitoring stock dan harga BAPOKTING</p> <p>Terlaksananya koord stock BAPOKTING di Kementerian</p> <p>Terlaksananya informasi Melalui Media cetak dan Elektronik dlm rangka sistem peningkatan dini kelangkaan bapokting</p> <p>Terlaksananya OP pemberian Subsidi hrg Komoditi dalam rangka pengendalian inflasi</p> <p>Terlaksananya Pasar Murah untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam hari besar keagamaan</p> <p>Terlaksananya Pemantauan BAPOKTING ditingkat pedagang bsr distributor dan pengecer di kota Palu dan sekitarnya</p> <p>Terpantauanya penyaluran gas elpiji 3 kg subsidi</p> <p>Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi d kab/kota 2 musim tnm</p> <p>Terlaksananya bimtek Pengembangan Sistem Logistik</p> <p>Terlaksananya koordinasi sistem logistik daerah di kementerian</p> <p>Terlaksananya pemantauan penerbitan TDG di kab/kota</p> <p>Terlaksananya pendataan antara pulau logistik di kab/kota</p>		<p>Kegiatan Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)</p> <p>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan saranaan Distribusi Perdagangan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya koordinasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan</p> <p>Terlaksananya sosialisasi peningkatan daya saing sarana distr perdagangan di kab/kota</p> <p>Terlaksananya bimtek peningkatan pengelolaan pasar rakyat</p> <p>Terlaksananya penilaian pasar Rakyat berbasis SNI</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan pusat Distribusi Provinsi</p> <p>Terpantaunya data/informasi bongkat muat (antar pulau)</p> <p>Terlaksananya bimtek pembinaan dan pengembangan pelaku terhadap usaha bisnis dan jasa distribusi</p> <p>Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan pelaku</p> <p>Terhadap usaha bisnis dan jasa distribusi di Kementrian</p> <p>Terlaksananya peningkatan &amp; pengembangan data informasi secara online</p> <p>terlaksananya sosialisasi pembinaan kelembagaan minol kab/kota</p> <p>terlaksananya sosialisasi pembinaan kelembagaan B2 di kab/kota</p> <p>terlaksananya bimtek MLM di kab/kota</p> <p>Terlaksananya pendataan waralaba di kab/kota</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pembinaan waralaba di kab/kota</p> <p>Terlaksananya pendataan penerbitan SIUP/TDP kab/kota</p>		<p>Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha perdagangan</p>



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya koordinasi pembinaan &amp; pengembangan perdagangan produk daerah</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pembinaan &amp; pengembangan produk dan pencantuman label pada produk/kemasan</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pembinaan perdagangan produk mainan anak dan pakaian bayi bagi pelaku usaha daerah</p> <p>Terlaksananya pemantauan perdagangan dalam negeri produk MKG dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia</p> <p>Terlaksananya sinkron kebijakan perdag dlm negeri pusat &amp; prop</p> <p>Terlaksananya sos sinkronisasi kebijakan perdagangan dlm negeri pusat, prop dan daerah</p> <p>Terlaksananya Rakor perdagangan se-Sulteng di kab/kota</p> <p>Terlaksananya rakor Perdagangan di Kementrian</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG)</p> <p><b>Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus)</b></p> <p>Meningkatkan Teknis Edukasi Konsumen Cerdas</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen</p> <p>Terlaksananya pembuatan spanduk/brosur/stiker/baner</p> <p>konsumen cerdas</p> <p>Terlaksananya Motivator Perlindungan Konsumen kepada Mahasiswa dan Sosialisasi Motivator</p>		<p><b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b></p> <p>Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Perlindungan konsumen serta monitoring Motivator Perlindungan Konsumen.</p> <p>Meningkatnya Penerapan Sistim Pengawasan Perlindungan Konsumen</p> <p>Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan PemberdayaanKonsumen</p> <p>Terlaksananya Koordinasi pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen di Kementerian</p> <p>Meningkatkan Penyusunan Pedoman/Juknis SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Pengawasan Produk SNI Wajib dan kadaluarsa</p> <p>Terlaksananya Pengawasan Label, Manual Kartu Garansi Berbahasa Indonesia dan Pengawasan Distribusi dan Jasa</p> <p>Terpenuhiya Pembelian sampel dan pengujian barang beredar</p> <p>Terlaksananya Bimtek Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa PPBJ Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terlaksananya Pengawasan BDKT / Barang Dalam</p> <p>Keadaan Tertutup Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pengawasan barang beredar dan jasa di Kementerian</p>		<p>Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L</p> <p>Terlaksananya Bimtek pengawasan dan penegakkan hukum secara administrasi atau pidana di bidang perizinan perdagangan</p> <p>Terlaksananya Penegakan Hukum Distribusi barang pokok dan Barang Penting serta yang diatur</p> <p>Terlaksananya Penegakan Hukum dibidang Metrologi Legal</p> <p>Tercapainya Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur</p> <p>Tercapainya penerapan Standar bagi yang SNI nya diberlakukan secara wajib</p> <p>Tercapainya Koordinasi dengan Instansi terkait untuk</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Produk Dalam Negeri dan Produk Impor SNI Wajib</p> <p>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengawasan mutu Barang Melalui Penguatan Lembaga Penilaian kesesuaian</p> <p>Terpenuhiya Pembelian sampel dan pengujian mutu barang</p> <p>Tercapainya Peningkatan Pengawasan Mutu Barang</p> <p>Terlaksananya Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen</p> <p>Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen</p>		<p>Kegiatan Tertib Niaga</p> <p>Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah</p> <p>Peningkatan Pengawasan Mutu Barang</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Tercapainya Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Pengawasan SPBU</p> <p>Terlaksananya Pembentukan BPSK di Kab/Kota</p> <p>Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan</p> <p>Penyelesaian Sengketa Konsumen</p> <p><b>Ekspor bersih perdagangan (jt USD)</b></p> <p>- Pameran Nasional; UKM Mengikuti Diklat</p> <p>Ekspor Impor; - Work Shop Manajemen Pemasaran; Potensi Ekspor; - Bimtek /Pelatihan Kementerian Perdagangan; - Misi Dagang Dalam Negeri dan Luar Negeri; - Sosialisasi Pasar Komoditi Ekspor</p> <p>Aparatur , UKM, Ekspertir dan Masyarakat Umum</p> <p>- Sosialisasi Certificate Of Origin; - Sosialisasi Angka Pengenal Impor; - Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor;</p> <p>Trade and Investmen Forum; Diseminasi potensi komoditi ekspor; Bimtek /workshop pengembangan potensi ekspor; Hilirisasi produk ekspor; Temu Usaha Peningkatan Potensi daerah; Sosialisasi UKM Potensi ekspor; Pemutahiran data potensi ekspor; Penyusunan Profil IKM/UKM</p> <p>Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Koperasi</p>	<p><b>Dinas Koperasi dan UMKM</b></p>	<p><b>Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Luar Negeri</b></p> <p>Kegiatan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan</p> <p>Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri</p> <p>Kegiatan Pengembangan Potensi Ekspor</p> <p><b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Meningkatnya Produktifitas Koperasi</p> <p>Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil</p>		<p>Pembinaan Kelembagaan Koperasi</p> <p>Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi</p> <p><b>Program Peningkatan usaha koperasi</b></p> <p>Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi</p> <p>Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perkoperasian</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi</p> <p><b>Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil</b></p> <p>Peningkatan Fasilitasi Usaha Kecil</p> <p>Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil</p> <p>Peningkatan Kualitas Kewirausahaan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
VII	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing	<p>Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan</p> <p>Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Produktivitas Padi (KW/Ha)</p> <p>Produktivitas Jagung (KW/Ha)</p> <p>Produktivitas Kedelai (Kw/Ha)</p> <p>Produktivitas K.Tanah (Kw/Ha)</p> <p>Produktivitas K.Hijau (Kw/Ha)</p> <p>Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha)</p> <p>Produktivitas Ubi Jalar (Kw/Ha)</p> <p>Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen (%)</p> <p>Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan (%)</p> <p>Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan (%)</p> <p>Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan (%)</p>	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	<p><b>Program Pengembangan Kualitas</b></p> <p>Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Perencanaan Pengembangan Komoditas</p> <p>Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Perencanaan Pengembangan Komoditas</p> <p>Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana DAK</p> <p><b>Program Peningkatan Produksi dan</b></p> <p>Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Produksi</p> <p>Tanaman Serealia</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Produksi</p> <p>Tanaman Aneka Kacang dan Umbi</p> <p>Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan</p> <p><b>Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Produktivitas Jeruk Siam (Kw/Ha) Produktivitas Durian (Kw/Ha) Produktivitas Pisang (Kw/Ha) Produktivitas anggrek/bunga potong (tangkai/m2)  Produktivitas Bawang Merah (Kw/Ha) Produktivitas Cabai Besar (Kw/Ha) Produktivitas Cabai Rawit (Kw/Ha) Produktivitas Kentang (Kw/Ha) Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura (%)  Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura (%) Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura (%)  Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES (%)  Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan (Km) Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura (Ha)  Optimasi Lahan Tanaman Pangan/Hortikultura Mendukung Petani Miskin (Petani) Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian  Mendukung tanaman pangan dan hortikultura (%)  Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan		Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan  Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan  Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura  <b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>  Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura  Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.  Kegiatan Fasilitas, Pengawasan Pupuk dan Pestisida

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura (%)            Jumlah Kabupaten Terfasilitasi (Kab. Parimo, Kab. Tolitoli, Kab. Donggala)</p> <p>Peningkatan Persentase Terbinanya dan Terpantaunya Kelembagaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)            Persentase Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)            Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)</p> <p>Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K (%)</p> <p>Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Pemberian Kartu Petani Miskin (Orang)</p> <p>Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan dan Menurunnya Tingkat Kehilangan Hasil Panen            Peningkatan jalan kantong produksi (KM)            Penguatan hak atas tanah kebun petani (persil)            Suplesi air irigasi di lahan perkebunan (unit)</p> <p>Penyediaan alat dan mesin perkebunan (unit)            Penyediaan pupuk majemuk (kg)            Penyediaan pestisida (liter)</p> <p>Jumlah unit pengolahan hasil usaha yang dibangun (poktan)</p>	<p><b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b></p>	<p>Pendampingan WISMP</p> <p><b>Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>            Kegiatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.</p> <p>Kegiatan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian</p> <p>Pemberdayaan Petani Miskin</p> <p><b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Prasarana Pengolahan serta Pemasaran Hasil perkebunan</b></p> <p>Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan</p> <p>Kegiatan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan</p> <p>Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Mutu dan Standarisasi (Poktan)</p> <p>Jumlah kelompok yang menerima bantuan alat fermentasi kakao (Poktan)</p> <p>Jumlah kelompok yang mengikuti Bimtek fasilitasi kemitraan usaha (Poktan)</p> <p>Jumlah dokumen informasi pasar (dokumen)</p> <p>Jumlah even promosi yang diikuti (kali)</p> <p>Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan KAKAO</p> <p>Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi Optimasi Tanaman</p> <p>KELAPA DALAM Peremajaan</p> <p>CENGKEH Peremajaan</p> <p>KOPI ROBUSTA Pengembangan</p> <p>LADA Pengembangan</p> <p>Jumlah kebun yang dibina (ha)</p> <p>Jumlah kebun yang dibangun (ha)</p> <p>Jumlah kebun yang direhabilitasi (ha)</p> <p>Terlaksananya standarisasi pembangunan/pengolahan Perusahaan Besar Swasta (Buah PBS)</p> <p>Terdatanya kelompok tani perkebunan (kabupaten)</p> <p>Jumlah kelembagaan kelompok tani yang mandiri (Poktan)</p> <p>Meningkatnya modal usaha dan pupuk organik (kabupaten)</p>		<p><b>Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b></p> <p>Kegiatan Produksi dan Perbenihan Perkebunan</p> <p>Kegiatan Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Menguatnya kapasitas pendamping dalam menata kelembagaan kelompok tani (petugas) Rakor GUP (kali) Mitigasi dan perubahan iklim (poktan) SL- IKLIM (poktan)</p> <p>Luas areal pengendalian OPT kakao (ha) Luas areal pengendalian OPT kelapa (ha) SL-PHT (poktan) Identifikasi dan peramalan OPT 8 komoditi perkebunan (dokumen)</p> <p>Jumlah peningkatan populasi ternak sapi Jumlah kelompok yang mendapat bantuan ternak Meningkatnya status kesehatan hewan Meningkatnya jaminan higienis sanitasi pangan asal hewan yang ASUH Jumlah areal padang penggembalaan dan produktifitas padang penggembalaan Jumlah bibit ternak yang berkualitas Jumlah populasi dan produksi ternak sapi,kerbau kambing dan domba Jumlah populasi dan produksi ternak unggas dan babi</p> <p>Jumlah kelompok yang mendapat bantuan ternak Jumlah kelompok mandiri Meningkatnya SDM anggota kelompok</p> <p>Meningkatnya status kesehatan hewan</p> <p>Menurunnya Angka Kematian Meningkatnya jaminan higienis sanitasi pangan asal hewan yang ASUH Meningkatnya unit usaha peternakan yang</p>		<p>Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan</p> <p><b>Program Peningkatan Populasi Ternak</b></p> <p>Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia</p> <p>Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia</p> <p>Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Teknologi Peternakan</p> <p>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Jumlah bibit ternak yang berkualitas</p> <p>Jumlah areal padang penggembalaan dan produktifitas padang penggembalaan</p> <p>Jumlah fasilitasi alsinak dan tata kelola air</p> <p>Pengembangan jaringan pemasaran produk hasil peternakan</p> <p>Peningkatan kelompok penerima modal dan sarana usaha peternakan</p> <p>Jumlah kelompok pelaku usaha produk hasil peternakan</p> <p>Meningkatnya jaringan pemasaran produk hasil peternakan</p> <p>Jumlah kelompok penerima modal dan sarana usaha peternakan</p> <p>Jumlah Usaha Peternakan yang memperoleh rekomendasi, izin usaha dan dokumen sistem mutu</p> <p>Meningkatnya kualitas SDM Lulusan Pendidikan Tinggi dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan</p> <p>Tersedianya SDM dan Pelayanan Pendidikan Perikanan dan Kelautan</p> <p>Meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh kelautan dan perikanan</p> <p>Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya</p> <p>Nilai Tukar Perikanan Budidaya (NTP-Budidaya) (%)</p>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>Peningkatan Mutu Bibit Ternak</p> <p>Perluasan Areal Padang Penggembalaan dan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas</p> <p>Penyediaan Alat Mesin Peternakan dan tata kelola air</p> <p><b>Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Rakyat</b></p> <p>Promosi dan Pemasaran Produk Ternak dan Olahannya</p> <p>Pembinaan Permodalan dan Sarana Usaha Peternakan</p> <p>Pembinaan, Pencapaian Jaminan Mutu Produk Ternak</p> <p><b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b></p> <p>Pendidikan kelautan dan perikanan</p> <p>Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kelautan dan Perikanan</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Berkembangnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan</p> <p>Tersedianya Jumlah unit yang tersertifikasi CBIB</p> <p>Terkelolanya kawasan perikanan budidaya</p> <p>Kelompok Usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan</p> <p>Terkelolanya Pengelolaan pakan ikan</p> <p>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis perikanan lainnya</p> <p>Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap</p> <p>Nilai Tukar Perikanan Tangkap (NTN) (%)</p> <p>Jumlah ekosistem PUD yang terkelola Sumber Daya Ikannya (buah)</p> <p>Jumlah perairan laut teritorial di kepulauan yang terkelola Sumber Daya Ikannya (WPP)</p> <p>Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap</p> <p>Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit)</p> <p>Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)</p> <p>Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang)</p> <p>Jumlah pelabuhan yang dibina termasuk pelabuhan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (pelabuhan)</p>		<p>Pengelolaan sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan</p> <p>Pengelolaan sistem perbenihan ikan</p> <p>Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya</p> <p>Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan</p> <p>Pengelolaan Pakan Ikan</p> <p>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya perikanan budidaya</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI)</p> <p>Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan sertifikasi kapal perikanan</p> <p>Pengelolaan pelabuhan perikanan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)</p> <p>Terlaksananya pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien tertib dan berkelanjutan</p> <p>Jumlah pengembangan kelembagaan KUB yang mandiri (KUB)</p> <p>Jumlah pembinaan kenelayanan (lokasi)</p> <p>Jumlah pengembangan investasi dan permodalan usaha (lokasi)</p> <p>Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)</p> <p>Jumlah pengembangan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Bid. Tangkap (dokumen)</p> <p>Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan Sulteng</p> <p>Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kap/thn)</p> <p>Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp.)</p> <p>Jumlah Pasar yang Terbina (pasar)</p> <p>Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Promosi dan Kerjasama hasil Perikanan (dokumen)</p> <p>Peningkatan Mutu dan Diversifikasi produk kelautan</p> <p>Peningkatan Mutu dan Diversifikasi produk Perikanan</p>		<p>Pengendalian Penangkapan Ikan</p> <p>Pengelolaan Kenelayanan</p> <p>Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya perikanan tangkap</p> <p><b>Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b></p> <p>Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan</p> <p>Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan</p> <p>Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan</p> <p>Terwujudnya investasi usaha kelautan dan perikanan</p> <p>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang PDS</p> <p>Jumlah luas kawasan konservasi (ha)</p> <p>Meningkatnya pengembangan konservasi kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil</p> <p>Luas lahan konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ha)</p> <p>Tersedianya perencanaan penataan ruang laut</p> <p>Meningkatnya pendayagunaan masyarakat pesisir yang tangguh dan mandiri</p> <p>Meningkatnya pendayagunaan masyarakat di pulau-pulau kecil</p> <p>Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil</p> <p>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya bidang PRL</p> <p>Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan SDKP</p> <p>Terlaksananya pengoperasian kapal pengawas pengawasan SDKP</p>		<p>Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan</p> <p>Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan</p> <p>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PDS Produk Kelautan dan Perikanan</p> <p>Program Pengelolaan Ruang Laut</p> <p>Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut</p> <p>Perencanaan Ruang Laut</p> <p>Pendayagunaan Pesisir</p> <p>Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>Penataan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang PRL</p> <p>Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur</p> <p>Pengoperasian Kapal Pengawas</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan pengawasan SDKP</p> <p>Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan pengawasan SDKP</p> <p>Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan pengawasan SDKP</p> <p>Terlaksananya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang pengawasan pengelolaan SDKP</p>		<p>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan</p> <p>Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan</p> <p>Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP</p>
		<p>Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Wisata Unggulan</p> <p>- Lama Tinggal Wisatawan - ( Hari / Orang ).</p> <p>1. Mancanegara 2. Nusantara</p> <p>- Pengeluaran Wisatawan Harian :</p> <p>1. Mancanegara (USD/Hari) 2. Nusantara ( Rp/Hari )</p> <p>- Jumlah kunjungan Wisman (Orang)</p> <p>- Jumlah kunjungan Wisnus (Orang)</p> <p>- Jumlah Kunjungan Wisman ( orang ).</p> <p>- Jumlah Kunjungan Wisnus (orang).</p> <p>- Jumlah Festival Seni dan Budaya Daerah</p> <p>Jumlah invenstasi dan mitra usaha yang tersertifikasi</p> <p>Peningkatan Mitra Usaha Pariwisata</p> <p>Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi</p>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<p><b>PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p>Perwilayahan dan Investasi Pariwisata</p> <p>Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata</p> <p>Atraksi dan Tata Kelola Destinasi</p> <p><b>PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b></p> <p>Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah</p> <p>Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata</p> <p>Strategi Pemasaran Pariwisata</p> <p><b>PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA</b></p> <p>Kemitraan Usaha Pariwisata</p> <p>Standar Usaha Pariwisata</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata  Jumlah SDM Kepariwisataan yang berkualitas Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisataan Dokumen Litbang Kepariwisataan  Peningkatan Kerja Sama Kepariwisataan		Sertifikasi Usaha Pariwisata  <b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN</b> Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan  Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
VIII	<b>Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan</b>	<p>Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola.</p> <p>Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan Persampahan</p> <p>Meningkatnya kerjasama pengelolaan antara daerah</p> <p>Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap Parameter yang dipantau (%); Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Meningkat</p> <p>Terlaksananya pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi</p> <p>Terpantaunya kualitas air udara tanah serta pesisir dan laut</p> <p>Terlaksananya penertiban kegiatan PETI</p> <p>Tersusunnya kebijakana manajemen pengelolaan B3 dan limbah B3</p> <p>Terpantaunya dan terawasinya Pengelolaan Pemanfaatan Pengangkutan dan Penimbunan B3 dan Limbah B3</p> <p>Jumlah ijin yang dikeluarkan</p> <p>Tersusunnya BM Lingkungan dan BM Sumber Pencemar</p> <p>Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang terbina (lokasi)</p> <p>Hasil Inventarisasi GRK dan Profil GRK</p> <p>Profil dan Pembangunan Taman Kehati</p> <p>Terlaksananya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</p>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<p><b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b></p> <p>Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah</p> <p>Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antar Daerah</p> <p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p><b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b></p> <p>Pemantauan Sumber Pencemar Dinstitusi dan non institusi</p> <p>Pelaksanaan Pemantauan kualitas air, udara tanah serta pesisir dan laut</p> <p>Kordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)</p> <p>Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan B3 dan Limbah B3</p> <p>Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemanfaatan Pengangkutan dan Penimbunan B3 dan Limbah B3</p> <p>Pelaksanaan Perijinan Pengumpul dan Pengangkut B3 dan Limbah B3</p> <p>Penentuan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Sumber Pencemar</p> <p><b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b></p> <p>Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>Perencanaan Konservasi keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>Miitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Meningkatnya perlindungan pengawetan sumber daya alam secara lestari</p> <p>Jumlah pengawasan reklamasi usaha</p> <p>Terlaksananya pemantauan kerusakan lingkungan</p> <p>Terlaksananya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Meningkatnya koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove</p> <p>Kualitas informasi SDA dan ketersediaan informasi</p> <p>Tersedianya data informasi kualitas SDA dan LH</p> <p>Pengawasan pelaksanaan KLHS</p> <p>Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan KLHS</p> <p>Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha</p> <p>Meningkatnya penanganan dan penyelesaian kasus lingkungan</p> <p>Meningkatnya ketaatan aturan perusahaan wajib AMDAL/UKL/UPL dalam pelaksanaan RPL dan UKL</p> <p>Meningkatnya perusahaan yang terpantau dampak pentingnya</p> <p>Terlaksananya kegiatan koordinasi penyusunan AMDAL</p> <p>Terlaksananya kegiatan Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER)</p> <p>Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)</p>		<p>Pelaksanaan Perlindungan Pengawetan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara lestari</p> <p><b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber</b></p> <p>Pemantauan kerusakan lingkungan</p> <p>Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Prov. Sulteng</p> <p><b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber</b></p> <p>Pemantapan Data dan Informasi Kualitas SDA dan LH</p> <p><b>Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis</b></p> <p>Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p><b>Program Petaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b></p> <p>Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan</p> <p>Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Ijin Lingkungan</p> <p>Pemantauan Penilaian AMDAL bagi Jenis Usaha yang Mempunyai Dampak Penting</p> <p>Koodinasi Penyusunan AMDAL</p> <p>Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)</p> <p><b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Meningkatnya kapasitas MHA dalam PPLH</p> <p>Jumlah Kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang PPLH</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata/ Pembinaan PAUD</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Penilaian Kalpataru</p> <p>Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun</p> <p>Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS</p> <p>Produksi dan distribusi bibit berkualitas</p> <p>Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun</p> <p>Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib sebanyak 12 ijin/tahun</p> <p>Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah</p> <p>Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH</p> <p>Penataan batas blok/petak sepanjang 375 km/5 tahun</p> <p>Data Spasial wilayah KPH</p> <p>Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)</p> <p>Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian</p>	<p><b>DINAS KEHUTANAN</b></p>	<p>Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA)</p> <p>Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan LH</p> <p>Koordinasi Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata/Pembinaan PAUD</p> <p>Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura</p> <p>Koordinasi Penilaian Kalpataru</p> <p><b>Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung</b></p> <p>Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air</p> <p><b>Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha</b></p> <p>Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri</p> <p><b>Program Planologi dan Tata Lingkungan</b></p> <p>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p><b>Program Pengendalian Perubahan Iklim</b></p> <p>Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p><b>Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Frekuensi pelaksanaan perusakan sumberdaya hutan</p> <p>Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahunnya</p> <p>Luas usulan penetapan areal kerja hak kelola masyarakat melalui HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan</p> <p>Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan</p> <p>Identifikasi dan pemetaan wilayah adat</p> <p>Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</p> <p>Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya</p> <p>Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan</p> <p>Termanfaatkannya dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan</p> <p>Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi di daerah rawan bencana</p> <p>Tercapainya Dokumen Kajian Risiko Bencana Tercapainya Dokumen Penyusunan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Terlaksananya Pelatihan Managemen dan analisis Risiko Bencana</p> <p>Terlaksananya Informasi kebencanaan Melalui kampanye budaya sadar bencana</p> <p>Terlaksananya sosialisasi Simulasi / Geladi Sekolah Aman Bencana</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan SKPD, Dunia Usaha dan Masyarakat</p> <p>Terlaksananya kesepakatan antar SKPD terkait dalam menghadapi bencana</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Kesiapsiagaan</p>	<p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA</b></p>	<p>Pencegahan dan Pengamanan Hutan</p> <p><b>Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan</b></p> <p>Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial</p> <p><b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b></p> <p>Kegiatan Peningkatan Penyuluhan</p> <p>Pengurangan Resiko dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>Pengelolaan data dan informasi kebencanaan</p> <p>Kajian Risiko Bencana</p> <p>Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)</p> <p>Mitigasi daerah Rawan Bencana (Struktural dan Non Struktural)</p> <p>Penyebarluasan Informasi Kebencanaan</p> <p>Sekolah Aman Bencana</p> <p>Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana</p> <p>Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana</p> <p>Sosialisasi Kesiapsiagaan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya koordinasi kegiatan kesiapsiagaan di daerah maupun di luar daerah</p> <p>Terlaksananya Kesepakatan dalam menghadapi bencana</p> <p>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Apratur Sesuai Standar daerah</p> <p>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional</p> <p>Terhimpunnya data Rekonstruksi, terbangunnya sarana &amp; Prasarana Fisik Infrastruktur, Meningkatkan kondisi sosek Makona</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>Terlaksananya pembangunan kembali Sarana dan Prasarana Fisik Infrastruktur yang rusak akibat bencana</p> <p>Meningkatnya Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Korban Bencana (MAKONA)</p> <p>Termanfaatkan data-data kerusakan dan kerugian infrastruktur Pasca Bencana</p> <p>Terpenuhinya perbaikan sarana dan prasarana fisik wilayah pasca bencana dan perbaikan kondisi sosek masyarakat yang terdampak</p> <p>Terlatihnya sumber daya Aparatur pada BPBD Kab/Kota</p> <p>Terlaksananya Penanganan Darurat di daerah terkena bencana</p> <p>Tertanganinya korban akibat bencana</p> <p>Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat dan Tepat (TRC)</p> <p>Terlaksananya Fasilitas Penanganan Darurat Bencana berbasis masyarakat</p>		<p>Koordinasi dan Monitoring Kesiapsiagaan</p> <p>Simulasi / Gladi Penanggulangan Bencana</p> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>Pengadaan Sarana Dan Prasarana</p> <p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional</p> <p><b>Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Wilayah Pasca Bencana</b></p> <p>Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana Fisik Infrastruktur Yang Rusak</p> <p>Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana (MAKONA)</p> <p>Monev. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>Rehabilitasi Pasca Bencana</p> <p>Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)</p> <p><b>Program Penanganan Bencana, Kejadian Luar Biasa Dan Tanggap Darurat serta pengelolaan Peralatan dan logistik</b></p> <p>Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana</p> <p>Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penanganan Bencana Secara Cepat dan Tepat (TRC)</p> <p>Fasilitasi Penanganan di Daerah Bencana Berbasis Masyarakat</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Terlaksananya Penyediaan Logistik dan peralatan bencana</p> <p>Terinfentarisasinya Ketersediaan Logistik dan peralatan bencana di kabupaten / kota</p> <p>Terlaksananya Pendistribusian Logistik di daerah terkena bencana</p>		<p>Ketersediaan dan kesiapan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</p> <p>Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</p> <p>Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Rawan dan Terkena Bencana</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
IX	<p><b>Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b></p>	<p><b>Meningkatnya pendidikan menengah atas</b></p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan minat, bakat siswa SMA            Jumlah kegiatan administrasi SMA</p> <p>Jumlah kegiatan peningkt. Sarpras SMA            Jumlah kegiatan Peningkt Sarana Pemb. TIK dan Lab SMA</p> <p>Jumlah Pembinaan Sekolah SMA</p> <p>Jumlah Sekolah SMA yang mendapat bantuan dana DAK</p> <p><b>Meningkatnya pendidikan menengah kejuruan</b></p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama dunia usaha dan dunia industri            Jumlah pelaksanaan kegiatan minat, bakat siswa SMK            Jumlah kegiatan administrasi SMK</p> <p>Jumlah kegiatan peningkt. Sarpras SMK            Jumlah kegiatan Peningkt Sarana Pemb. TIK dan Lab SMK</p> <p>Jumlah Pembinaan Sekolah SMK</p> <p>Jumlah Sekolah SMK yang mendapat bantuan dana DAK</p> <p><b>Meningkatnya pendidikan non formal</b></p> <p>Meningkatnya jumlah guru berkualitas</p> <p>Jumlah pendidik yg dikualifikasi S2 kerjasama ITB lanjutan            Meningkatkan jumlah guru berkualitas</p> <p>Jumlah pendidik yg dikualifikasi S2 kerjasama ITB lanjutan            Jumlah pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah atas</p>	<p><b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b></p>	<p><b>Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas</b></p> <p>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA            Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA            Peningkatan sarana dan prasarana SMA            Peningkatan sarana pembelajaran TIK Dan Laboratorium SMA            Pengembangan dan Pembinaan SMA            DAK Fisik SMA</p> <p><b>Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan</b></p> <p>Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)            Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK            Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK            Peningkatan sarana dan prasarana SMK            Peningkatan sarana pembelajaran TIK Dan Laboratorium SMK            Pengembangan dan Pembinaan SMK            DAK Reguer SMK</p> <p><b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga</b></p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA            Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN SMA            Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMK            Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan            Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah atas</p> <p>Meningkatnya jumlah guru berkualitas</p> <p>Jumlah pendidik yg dikualifikasi kerjasama UNTAD/UT lanjutan SD</p> <p>Jumlah pendidik yg dikualifikasi kerjasama UT 2013</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Kursus</p> <p>Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Pengembangan PTK PAUDNI</p> <p>Jumlah Guru Mengikuti SI</p> <p>Jumlah Tutor PAUD Menerima Insentif</p> <p><b>Meningkatnya pendidikan luar biasa</b></p> <p>Jumlah keg. Pemb. minat bakat &amp; kreativitas siswa PKLK SD/SMP/SMA</p> <p>Gebyar PKLK SD/SMP/SMA</p> <p>Terlaksananya peningkatan mutu PTK PKLK</p> <p>Terlaksananya Tunjangan Guru Berdedikasi</p> <p>Meningkatnya bahan ajar dan sarana prasarana</p> <p>Jumlah Pembinaan Sekolah PK-PLK</p> <p>Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari SMANOR Tadulako</p> <p><b>Meningkatnya Wajar pendidikan dasar sembilan tahun</b></p> <p>Jumlah kegiatan lomba PAUD</p> <p>Jumlah kegiatan Peningkatan PAUD</p> <p>Jumlah APE</p>		<p>Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKDAS (*)</p> <p>Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi</p> <p>Peningkatan Kualifikasi PTK DIKDAS</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK-PNF</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK PAUDNI</p> <p>Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p><b>Program Pendidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ( **</b></p> <p>Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa PLB</p> <p>Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK</p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB) Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK Pengembangan dan peningkatan Mutu Management SKO</p> <p><b>Program Fasilitas Tugas Pembantuan Kependidikan</b></p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah TK</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Jumlah tenaga pendidik		Peningkatan Sarana dan Prasarana TK
		<p>Jumlah kegiatan administrasi</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana</p> <p>Meningkatnya jumlah guru berkualitas</p> <p>Jumlah kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa</p> <p>Jumlah manajemen BOS</p> <p>Jumlah kegiatan administrasi</p> <p>Jumlah kegiatan Peningkatan Sarpras SD/SMP</p> <p>Jumlah Kegiatan Peningkatan Bahan Ajar SD /SMP</p> <p>Jumlah Peningkatan Mutu Wajar 9 Tahun SD/SMP</p> <p>Terselenggaranya Program Pendidikan Non Formal</p> <p>Terlaksananya Publikasi Dan Sosialisasi Kursus Dan Dikmas</p> <p>Terselenggaranya Kursus KWK dan KWD</p> <p>Terselenggaranya Pemberdayaan Gender</p> <p>Terlatihnya Tenaga Pendidik Lembaga Kursus</p> <p>Jumlah Peserta tkt. Propinsi dan Tkt. Nasional</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Warga Belajar Keaksaraan Fungsional</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Kursus</p> <p><b>Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan</b></p>		<p>Pembinaan dan Pengelolaan Lembaga PAUD Peningkatan sarana dan prasarana Lembaga PAUD</p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas PAUD</p> <p>Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SD /SMP</p> <p>Pengelolaan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</p> <p>Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SD/ SMP</p> <p>Peningkatan Sarana dan prasarana SD/ SMP</p> <p>Peningkatan Bahan Ajar SD/ SMP</p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Wajar 9 Tahun dan Sederajat SD/ SMP</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Non Formal</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Publikasi dan Sosialisasi Kursus dan Dikmas</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Penyelenggaraan KWK/KWD</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kursus</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga PKBM dan Kursus</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Penuntasan Buta Aksara</p> <p>Pendidikan Non Formal</p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Kursus</p> <p><b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Jumlah kegiatan penerapan SIMP		Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
		<p>Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Jumlah kegiatan kajian dan pengembangan inovasi</p> <p>Jumlah kegiatan rapat</p> <p>Jumlah kegiatan Sekolah Sehat</p> <p>Jumlah kegiatan pembinaan sekolah sehat</p> <p>Jumlah kegiatan binaan kantin kejujuran</p> <p>Jumlah Dukungan Operasional Dewan Pendidikan/lembaga/lintas sektor lainnya</p> <p><b>Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</b></p> <p>Peningkatan Pelestarian BCB / Situs</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Guru TOT Kesenian</p> <p>Tersebar nya Data / Informasi Nilai dan Geografi Sejarah</p> <p>Terlaksananya lawatan sejarah</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi</p> <p>Terlaksananya dialog sejarah</p> <p>Terselenggaranya pembinaan kesenian</p> <p>Terseenggaranya keg. Pengelolaan kesenian</p>	<p><b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b></p>	<p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pendidikan</p> <p>Pengkajian dan pengembangan inovasi dan sistem kerjasama terpadu pendidikan</p> <p>Rapat koordinasi pendidikan se Sulawesi Tengah</p> <p>Pembinaan dan penilaian sekolah sehat</p> <p>Pembinaan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan</p> <p>Pengembangan manajemen pengelolaan satuan pendidikan menengah</p> <p>Pengembangan Perencanaan dan sosialisasi Program Pendidikan serta Kerjasama lintas sektor/lembaga</p> <p><b>Program Kebudayaan ( ** )</b></p> <p>Pelestarian dan pemanfaatan Peninggalan purbakala dan permuseuman</p> <p>Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan kesenian dan kepercayaan kepada TYME</p> <p><b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Kepemudaan</b></p> <p>Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Kegiatan Pameran Hasil Karya Pemuda Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Adanya Fasilitas Aksi Bakti Kepemudaan		Kegiatan Fasilitas Aksi Bakti Kepemudaan
		<p>Terlaksananya Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Terlaksananya Lomba Karya Tulis Pemuda</p> <p>Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor</p> <p>Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Paskibraka</p> <p>Adanya Purwacaraka Pemuda Pelopor</p> <p>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pemuda Perintis</p> <p>Adanya Fasilitas Pertukaran Pemuda</p> <p>Adanya Fasilitas Duta Pemuda Daerah</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Bela Negara</p> <p>Adanya Fasilitas Pemuda Bahari</p> <p>Adanya Fasilitas Dialog Kepemimpinan</p> <p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Tercapainya Pembinaan Cabang Prestasi di Daerah</p> <p>Adanya Penghargaan Untuk Atlet Berprestasi</p> <p>Tercapaiannya Kerjasama dalam Peningkatan Olahragawan Berbakat</p> <p>Terlaksananya Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah</p> <p>Terlaksananya Kompetisi Olahraga</p> <p>Adanya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi</p> <p>Adanya Pembinaan Olahraga di Masyarakat</p>		<p>Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda</p> <p>Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah di kalangan Pemuda</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor</p> <p>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera</p> <p>Kegiatan Purwacaraka Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi</p> <p>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemuda Perintis</p> <p>Kegiatan Fasilitas Pertukaran Pemuda</p> <p>Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Duta Pemuda Daerah</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Wawasan Bela Negara</p> <p>Kegiatan Fasilitas Pemuda Bahari</p> <p>Kegiatan Fasilitas Dialog Kepemimpinan</p> <p>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemuda</p> <p><b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan</b></p> <p>Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</p> <p>Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berprestasi</p> <p>Kegiatan Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan lembaga instansi Lainnya</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</p> <p>Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekrasi</p> <p>Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang dimasyarakat</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Terlaksananya Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat		Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
		<p>Terlaksananya Pengembangan Olahraga Tradisional Adanya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Layanan Khusus</p> <p>Terlaksananya Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat</p> <p>Terlaksananya Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga</p> <p>Adanya Pembibitan dan Pembinaan Olahraga</p> <p>Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Bidang Pendidikan</p> <p>Adanya Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Adanya Fasilitas Bantuan Peralatan Pendukung Usaha Pemuda</p> <p>Tercapainya Pola Kemitraan Antar Pemerintah dan Masyarakat</p> <p>Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</p> <p>Terpantaunya Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan</p> <p>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan</p> <p>Meningkatnya kerjasama pola antara pemerintah dan masyarakat</p>		<p>Kegiatan Pengembangan Olahraga Tradisional</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</p> <p>Kemasayakatan Layanan Khusus</p> <p>Kegiatan Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat</p> <p>Kegiatan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga</p> <p>Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Pelajar dan Mahasiswa</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Bidang Pendidikan</p> <p>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Olahraga</p> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga</b></p> <p>Kegiatan Fasilitas Bantuan Peralatan Pendukung Usaha Pemuda</p> <p>Kegiatan Peningkatan Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</p> <p>Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</p> <p>Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kepemudaan</p> <p>Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah Provinsi dan Kab/Kota</p> <p>Kegiatan Peningkatan kerjasama pola antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana Olahraga</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga</p> <p>Terpantaunya Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga</p>		<p>Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga</p> <p>Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga</p>
		<p>Tercapainya Pemeliharaan Rutin berkala sarana dan prasarana olahraga</p> <p>Terlaksananya Pengadaan alat Fasilitas Olahraga</p> <p>Tersedianya Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>Berkembangnya Sistem Sertifikasi dan standarisasi Profesi</p> <p>Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembangunan Olahraga</p> <p>Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Iven Kepemudaan dan Keolahragaan</p> <p>Adanya Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Meningkatnya Mutu Organisasi dan tenaga Keolahragaan</p> <p>Berkembangnya Perencanaan Olahraga Terpadu</p> <p>Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga</p> <p>Meningkatnya Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga</p> <p>Meningkatnya Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan</p> <p>Adanya Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda</p>		<p>Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala sarana dan prasarana olahraga</p> <p>Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana olahraga Daerah Provinsi dan Kab/Kota</p> <p>Kegiatan Pengadaan alat Fasilitas Olahraga</p> <p>Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi dan standarisasi Profesi</p> <p>Kegiatan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Olahraga</p> <p>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Iven Kepemudaan dan Keolahragaan</p> <p>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan</p> <p><b>Program Pembinaan Kapasitas Tenaga dan Kelembagaan</b></p> <p>Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga Keolahragaan</p> <p>Kegiatan Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu</p> <p>Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga</p> <p>Kegiatan Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga</p> <p>Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah</p> <p>Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kegiatan Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pelatih Paskibraka Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Adanya Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelatih Paskibraka Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan
		Meningkatkan Mutu Organisasi Kepramukaan Terlaksananya Pembinaan Manajemen Organisasi Kepramukaan Tercapainya Fasilitasi temu Pembina/Majelis/Satuan Karya/Penegak dan Pandega Tingkat Provinsi Adanya Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan		<b>Program Pembinaan Kepramukaan</b>  Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Kepramukaan Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Kepramukaan Kegiatan Fasilitasi temu Pembina/Majelis/Satuan Karya/Penegak dan Pandega Tingkat Provinsi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
X	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas	<p>Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas            Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar            Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar            Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas            Persentase Produk dan Alat Kesehatan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat            Persentase Rumah Sakit yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan            Persentase Puskesmas yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan</p> <p>Persentase Puskesmas yang Terakreditasi            Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer</p> <p>Persentase Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Rujukan            Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 PKM yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Aman dan Bermanfaat Sebagai Pelayanan dan Komplementer</p>	DINAS KESEHATAN	<p><b>Program Upaya Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan</b></p> <p><i>Kegiatan:</i>            Peningkatan Mutu Penggunaan dan Distribusi Obat            Peningkatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <p><b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer</b></p> <p><i>Kegiatan :</i>            Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas</p> <p><b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan</b></p> <p><i>Kegiatan :</i>            Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Rumah Sakit</p> <p><b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah</b></p> <p><i>Kegiatan :</i>            Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah</p> <p>Setiap Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar SPM</p> <p>Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar SPM</p> <p>Setiap Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM</p> <p>Setiap Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM</p> <p>Setiap Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar SPM</p> <p>Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII, dan IX</p> <p>Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Remaja</p> <p>Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan</p> <p>Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan ANC Minimal 4 Kali (K4)</p> <p>Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan TP-Persentase puskesmas yang menyelenggarakan</p> <p>kesehatan kerja dasar</p> <p>Jumlah Pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI/TPI</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 PKM yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Olah Raga</p> <p>Setiap orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut</p>		<p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah</p> <p><b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b></p> <p><i>Kegiatan:</i></p> <p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga</p> <p>Peningkatana Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga</p> <p><b>Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat</b></p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan Tambahan</p> <p>Persentase Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan</p> <p>Persentase Remaja Putri Mendapatkan TTD</p> <p>Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD 90 Tablet Selama Masa Kehamilan</p> <p>Persentase Cakupan IMD (Inisiasi Menyusui Dini)</p> <p>Persentase Bayi Usia Kurang dari 0-6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif</p> <p>Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Dokumen Distric Health Account (DHA)</p> <p>Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi</p> <p>Pangan Sesuai Standar SPM</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat</p> <p>Insiden rate (IR) 49 per 100.000 penduduk</p> <p>Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis (spesifik daerah)</p> <p>Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk</p> <p>Persentase Keberhasilan Pengobatan</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)</p>		<p><i>Kegiatan:</i> Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p><b>Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan</b></p> <p><i>Kegiatan:</i> Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan</p> <p><b>Program Upaya Kesehatan Lingkungan</b></p> <p><i>Kegiatan:</i> Peningkatan Pelayanan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat</p> <p><b>Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi</b></p> <p><i>Kegiatan:</i> Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Pelayanan Imunisasi</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan advokasi atau Sosialisasi Pengendalian hepatitis Prevalensi Rate Angka Kesakitan Kusta &lt; 1/10.000 Penduduk Persentase Kab/Kota yang 50 % puskesmasnya melakukan tatalaksana standar</p> <p>Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus menuju eradikasi frambusia</p> <p>Annual Parasite Incidence (API) &lt; 1 per mil atau 1/1000 dari jumlah penduduk</p> <p>Prevalensi Sistosomiasis</p> <p>Persentase Kab/Kota endemis Filariasis yang melaksanakan POPM Filariasis</p> <p>Persentase jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di tangani sesuai standar</p> <p>Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap</p> <p>Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM</p> <p>Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)</p> <p>Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM</p> <p>Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu</p> <p>Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan</p> <p>Persentase kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok</p> <p>Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara</p> <p>Persentase kabupaten /kota yang melaksanakan kesehatan indra dan disfungsi</p> <p>Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>		<p><b>Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b></p> <p><i>Kegiatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</li> <li>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza</li> </ul>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Persentase RS Kab/Kota kelas C yang terjamin pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</p> <p>Jumlah RS rujukan regional kelas B yang diupayakan pemenuhan dokter spesialis dan subspesialis</p> <p>Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan (kumulatif)</p> <p>Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi (kumulatif)</p> <p>Persentase Institusi pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) yang di bina (kumulatif)</p> <p>Jumlah pengelolaan data dan informasi program PPSDMK</p> <p>Jumlah SDM Kesehatan yang di dayagunakan di fasyankes DTPK</p> <p>Jumlah tenaga kesehatan yang terintegrasi (kumulatif)</p> <p>Persentase pelatihan SDMK terakreditasi</p> <p>Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas kesehatan</p> <p>Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan</p> <p>Terwujudnya penataan aset daerah</p> <p>Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %</p>		<p><b>Program Upaya Penyediaan Sumber daya Manusia Kesehatan</b></p> <p><i>Kegiatan:</i> Pemenuhan Tenaga Kesehatan</p> <p>Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan</p> <p>Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan</p> <p><b>Program Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset</b></p> <p><i>Kegiatan:</i> Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p><b>Program Manajemen Pembangunan Kesehatan</b></p> <p><i>Kegiatan:</i> Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	PD YANG MELAKSANAKAN	PROGRAM
		<p>Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal</p> <p>Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (DIPA, DPA, RENJA, RKT dan PK)</p> <p>Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan</p> <p>Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas</p>		<p><b>Program Manajemen Kepegawaian, Umum dan Humas</b></p> <p><i>Kegiatan:</i></p> <p>Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum</p> <p>Pengembangan kapasitas administrasi hukum dan humas kesehatan</p>
<b>JUMLAH PROGRAM KESELURUHAN</b>				<b>188</b>

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2019 (diolah)

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan Tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan**  
**Urusan Pemerintahan Tahun 2020**

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) (RP)
1	2	3
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>449,707,709,217.00</b>
1	<b>Pendidikan</b>	<b>50,032,441,399.00</b>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	50,032,441,399.00
2	<b>Kesehatan</b>	<b>187,752,373,364.00</b>
	Dinas Kesehatan Daerah	66,508,176,185.00
	RSUD Undata	88,015,253,518.00
	RS Madani	33,228,943,661.00
3	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>184,197,703,114.00</b>
	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	66,312,424,824.00
	Dinas Cipta Karya dan SDA	117,885,278,290.00
4	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>16,907,833,338.00</b>
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16,907,833,338.00
5	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3,602,076,253.00</b>
	Satuan Polisi Pamong Praja	3,602,076,253.00
6	<b>Sosial</b>	<b>7,215,281,749.00</b>
	Dinas Sosial	7,215,281,749.00
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>176,675,306,166.00</b>
1	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>13,220,504,536.00</b>
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13,220,504,536.00
2	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>22,725,025,029.00</b>
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22,725,025,029.00
3	<b>Pangan</b>	<b>19,711,847,395.00</b>
	Dinas Pangan	19,711,847,395.00
4	<b>Pertanahan</b>	<b>0.00</b>
	-	0.00
5	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>5,311,975,612.00</b>
	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	5,311,975,612.00
6	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>3,845,145,369.00</b>
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,845,145,369.00
7	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>11,025,421,141.00</b>
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,025,421,141.00
8	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>3,028,709,947.00</b>
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,028,709,947.00
9	<b>Perhubungan</b>	<b>11,824,867,230.00</b>
	Dinas Perhubungan	11,824,867,230.00

<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik</b>	<b>7,213,558,124.00</b>
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	7,213,558,124.00
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>9,417,971,697.00</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9,417,971,697.00
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>8,431,823,110.00</b>
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,431,823,110.00
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>54,958,758,900.00</b>
	Dinas Pemuda dan Olahraga	54,958,758,900.00
<b>14</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>5,959,698,076.00</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,959,698,076.00
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>181,260,218,576.00</b>
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>33,439,920,480.00</b>
	Dinas Kelautan dan Perikanan	33,439,920,480.00
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>10,349,496,780.00</b>
	Dinas Pariwisata	10,349,496,780.00
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>	<b>99,933,505,435.00</b>
	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	45,422,871,048.00
	Dinas Perkebunan dan Peternakan	54,510,634,387.00
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>	<b>15,296,303,896.00</b>
	Dinas Kehutanan	15,296,303,896.00
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>7,671,578,425.00</b>
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7,671,578,425.00
<b>6</b>	<b>Perdagangan dan Industri</b>	<b>14,569,413,560.00</b>
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14,569,413,560.00
<b>D</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI</b>	<b>180,738,955,376.00</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>105,430,694,616.00</b>
	Biro Umum	9,860,427,118.00
	- TU Pimpinan	5,161,975,612.00
	- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,172,510,471.00
	Biro Administrasi Kewilayahan Daerah dan Pemerintahan	2,033,186,443.00
	Biro Otonomi Daerah	2,033,186,443.00
	Biro Hukum dan Perundang-Undangan	2,312,354,393.00
	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	16,568,516,891.00
	Biro Organisasi	2,312,354,393.00
	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	2,359,760,605.00
	Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	2,428,235,258.00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2,033,186,391.00
	Sekretariat DPRD	38,000,000,000.00
	Badan Penghubung	4,228,076,813.00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,582,174,529.00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	3,344,749,256.00
<b>2</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>4,371,877,079.00</b>
	Insektorat Daerah	4,371,877,079.00
<b>3</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>15,305,256,284.00</b>
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	15,305,256,284.00
<b>4</b>	<b>Keuangan</b>	<b>37,212,693,877.00</b>
	Badan Pendapatan Daerah	23,568,226,635.00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13,644,467,242.00
<b>5</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>4,382,174,529.00</b>
	Badan Kepegawaian Daerah	4,382,174,529.00

<b>6</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>9,627,510,294.00</b>
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9,627,510,294.00
<b>7</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>4,408,748,697.00</b>
	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	4,408,748,697.00
	<b>JUMLAH USULAN PPAS 2020</b>	<b>988,382,189,336.00</b>

*Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2019 (diolah)*

#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :



### 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)

Rincian Plafon Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja**  
**Tidak Langsung Tahun 2020**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,370,231,766,669.00</b>	<b>1,813,410,000,000</b>
	Belanja Pegawai	1,353,283,813,206.30	1,179,000,000,000
	Belanja Hibah	596,854,625,000.00	211,450,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,000.00	1,000,000,000
	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	393,130,000,000.00	399,960,000,000
	Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22,963,328,462.70	17,000,000,000
	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	5,000,000,000

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, 2019 (diolah)

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun anggaran 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp.55.428.542.595,00.

#### **5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan 2020 diproyeksikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp.66.700.000.000,00.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2020**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>55,428,542,595</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	55,428,542,595	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>55,428,542,595</b>	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>66,700,000,000</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	66,700,000,000	
3.2.3	Pembiayaan Pokok Utang		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>66,700,000,000</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(11,271,457,405)</b>	

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, 2019 (diolah)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang memuat rancangan program prioritas berdasarkan batas maksimal anggaran pada perangkat daerah (PD). Selain itu PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara yang dirinci berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Demikian Rancangan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.